



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2017

RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018

Daftar Isi

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-5
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II	
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Demografi	II-1
2.1.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.2. Aspek Demografi	II-19
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-21
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-21
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-27
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ...	II-29
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-30
a. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-30



	b. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-42
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-48
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi	II-48
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-49
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-50
2.1.4.4.	Fokus Sumberdaya Manusia	II-50
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-52
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-70
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-70
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-71
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Tahun 2017	III-1
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	III-6
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-16

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	
	DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2.	Tema Pembangunan Tahun 2017	IV-17
4.2.1.	Tema RKP Tahun 2017	IV-17
4.2.2.	Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2017	IV-18
4.2.3.	Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017	IV-19
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	
	DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	
LAMPIRAN		
	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018	



Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 1	Daftar SKPD Penanggung jawab Unsur Wajib dan Pilihan	1
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-4
Tabel 2.3	Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-6
Tabel 2.4	Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-8
Tabel 2.5	Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-10
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-12
Tabel 2.7	Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-17
Tabel 2.8	Distribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013-2015.....	II-24
Tabel 2.9	Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2013-2015	II-26
Tabel 2.10	Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2016	II-32
Tabel 2.11	Jumlah Fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2015	II-34
Tabel 2.12	Persentase Koperasi Aktf di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2016	II-41



Tabel 2.13	Jumlah UMKM di Kabupaten Lebak Tahumn 2014-2016	II-41
Tabel 2.14	Posisi Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan Bank Umum Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek di Kab. Lebak (Juta Rp)	II-42
Tabel 2.15	Posisi Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek Di Kabupaten Lebak (Juta Rp).....	II-42
Tabel 2.16	Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2016	II-44
Tabel 2.17	Produksi Palawija, Hrtikultura dan Tanaman Perkebunan Tahun 2014-2016	II-44
Tabel 2.18	Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2016 (Dalam Ribu Ton)	II-45
Tabel 2.19	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2016	II-63
Tabel 2.23	Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2016.....	II-50
Tabel 2.24	Rekap Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016	II-52
Tabel 2.25	Rekap Alasan Ketidaktercapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018.....	II-66
Tabel 2.25	Permasalahan Daerah Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	II-72
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2018.....	III-5
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015-2018	III-11



Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015-2018	III-15
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Belanja Kabupaten Lebak Tahun 2015-2018	III-17
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-4
Tabel 4.2	Indikator kinerja sasaran untuk setiap misi tahun 2018	IV-6
Tabel 4.3	Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2018	IV-20
Tabel 4.4	Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Program Pembangunan	IV-21
Tabel 5.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	V-2





BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG :

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal Juni 2017

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP. 19810228 220502 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Secara detail, pada pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah yaitu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2018 merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 .

Selanjutnya berdasarkan pasal 263 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin Perencanaan pembangunan daerah yang baik, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*time*) atau SMART.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lebak tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Sebagaimana diatur dalam Permen 54 Tahun 2010, bahwa untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang integral dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, mengacu RPJMD dan RTRW Provinsi Banten, serta RPJMN Tahun 2015-2019 dan RTRW Nasional guna menjaga sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan

Penelaahan sejumlah dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan dimaksud diatas dilakukan dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi sehingga diharapkan dapat tercapai keselarasan dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintahan, dan antarpemangku kepentingan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat hasil Evaluasi dari Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi : Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah meliputi Kondisi Ekonomi Daerah, Tantangan dan Proses Perekonomian Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Analisis terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi Isu Strategis dan Masalah Mendesak di Tingkat Daerah dan Nasional, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaannya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang Disusun Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, Kedudukan Tahun Rencana (RKPD) dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD yang disajikan dengan tabel.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman kesimpulan isi dari RKPD dan pointer harapan – harapan yang berkenaan dengan disusunnya buku RKPD tahun 2018.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

- a. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018.

Tujuan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 yaitu :

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan *stake holders* pembangunan lainnya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Lebak terletak di antara 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dan 105°25' - 106°18' Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 588.745 km² dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.

Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7), setelah Kecamatan Lebakgedong.

Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.



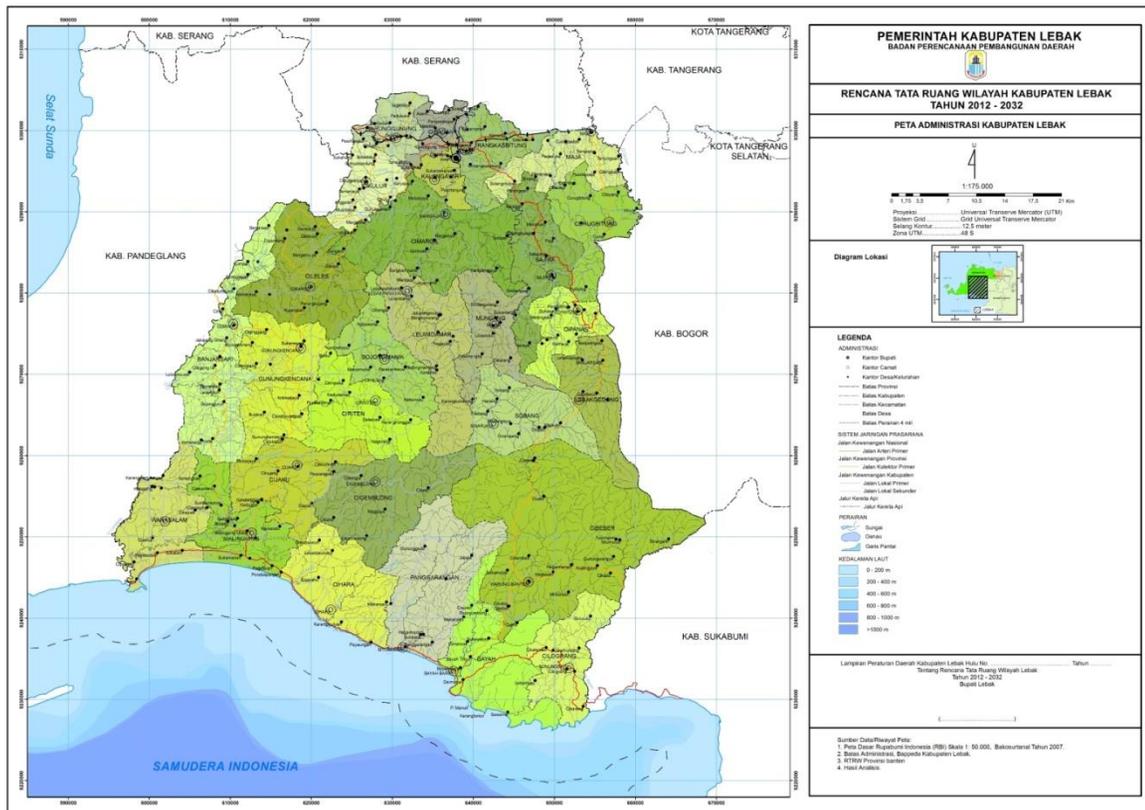
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Malingping	14	10.201,47	3,09
2	Wanasalam	13	11.419,02	3,45
3	Panggarangan	11	17.715,51	5,36
4	Bayah	11	14,377,21	4,35
5	Cilograng	10	9.601,71	2,91
6	Cibeber	22	40.096,41	12,13
7	Cijaku	10	11.468,42	3,47
8	Banjarsari	20	15.955,50	4,83
9	Cileles	12	15.338,76	4,64
10	Gunungkencana	12	13.801,50	4,18
11	Bojongmanik	9	9.591,83	2,90
12	Leuwidamar	12	14.305,09	4,33
13	Muncang	12	8.695,38	2,63
14	Sobang	10	11.149,34	3,37
15	Cipanas	14	6.525,30	1,97
16	Sajira	15	10.466,64	3,17
17	Cimarga	17	18.752,65	5,67
18	Cikulur	13	6.182,97	1,87
19	Warunggunung	12	4.736,53	1,43
20	Cibadak	15	3.632,71	1,10
21	Rangkasbitung	16	7.309,70	2,21
22	Maja	14	7.817,14	2,37
23	Curugbitung	10	9.317,33	2,82
24	Cihara	9	12.469,86	3,77
25	Cigemblong	9	15.304,93	4,63
26	Cirinten	10	12.254,95	3,71
27	Lebakgedong	6	9.159,98	2,77
28	Kalanganyar	7	2.859,34	0,87

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara topografi, keadaan Kabupaten Lebak cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 16 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

1. Ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut, tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku,



Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.

- Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang.

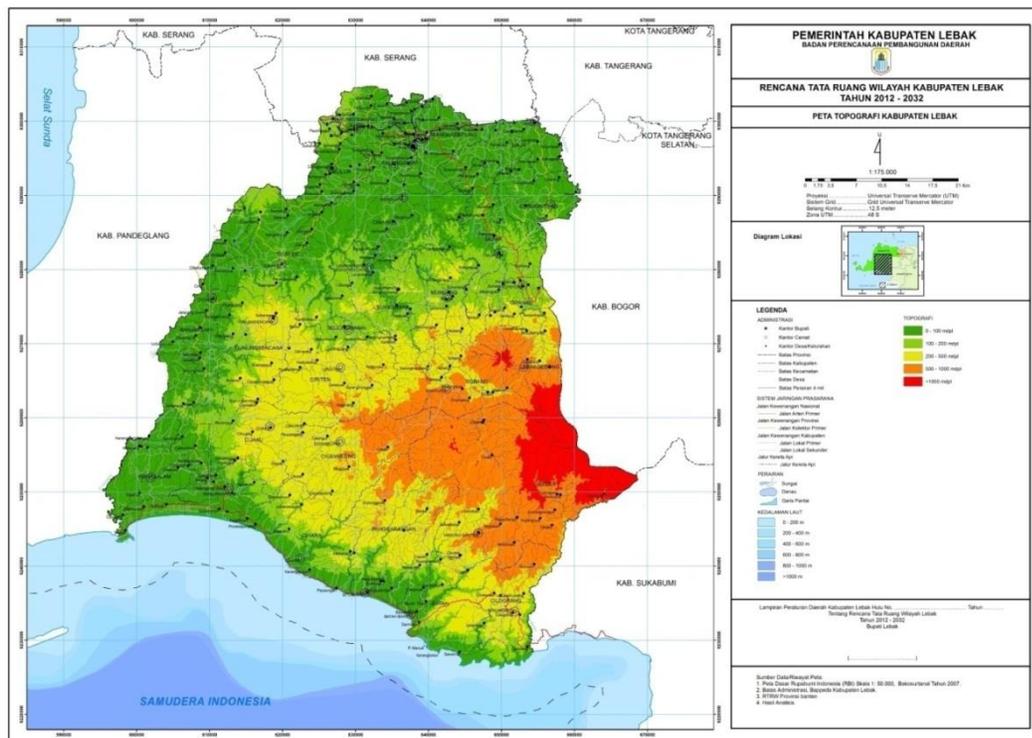
Keadaan topografi Kabupaten Lebak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
1.	Banjarsari	13.803,26	2.152,24				15.955,50
2.	Bayah	5.117,26	3.505,48	5.415,04	339,43		14.377,21
3.	Bojongmanik	552,81	5.194,13	3.720,09	124,81		9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber	16,30	249,71	4.926,78	26.021,80	8.881,82	40,096,41
6.	Cigemblong		87,54	9.973,54	5.243,85		15.304,93
7.	Cihara	4.319,76	3.941,22	4.208,88			12.469,86
8.	Cijaku	406,48	2.776,55	8.178,88	106,50		11.468,42
9.	Cikulur	5.575,09	607,88				6.182,97
10.	Cileles	10.701,09	4.531,52	105,83	0,32		15.338,76
11.	Cilograng	701,11	1.498,86	5.156,48	2.245,27		9.601,72
12.	Cimarga	15.794,41	2.786,21	172,03			18.752,65
13.	Cipanas	41,18	3.827,86	1.691,63	909,00	55,64	6.525,30
14.	Cirinten		403,06	10.512,94	1.338,96		12.254,96
15.	Curugbitung	7.141,83	2.167,20	8,30			9.317,33
16.	Gunungkencana	1.810,40	4.980,38	7.008,88	1,85		13.801,50
17.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
18.	Lebakgedong		126,46	2.761,35	3.579,16	2.693,02	9.159,98
19.	Leuwidamar	2.199,13	6.384,99	4.165,87	1.555,10		14.305,09
20.	Maja	7.817,14					7.817,14
21.	Malingping	8.447,82	1.636,43	117,22			10.201,47
22.	Muncang	384,54	3.664,69	4.078,26	509,87	58,02	8.695,38
23.	Panggarangan	2.934,25	1.780,78	9.833,92	3.166,57		17.715,51
24.	Rangkasbitung	7.309,67	0,004				7.309,71
25.	Sajira	5.379,68	4.049,49	1.020,92	16,55		10.466,64
26.	Sobang			3.730,04	6,731,65	687,65	11.149,34
27.	Wanasalam	11.408,40	10,62				11.419,02
28.	Warunggunung	3.048,09	1.688,44				4.736,53
	Jumlah	121.401,73	58.051,76	86.786,85	51.890,69	12.376,14	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Kabupaten Lebak berdasarkan lerengnya terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

1. 0 – 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
2. 2 – 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
3. 5 – 15%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
4. 15 – 25%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
5. 25 – 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak,
6. >40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.



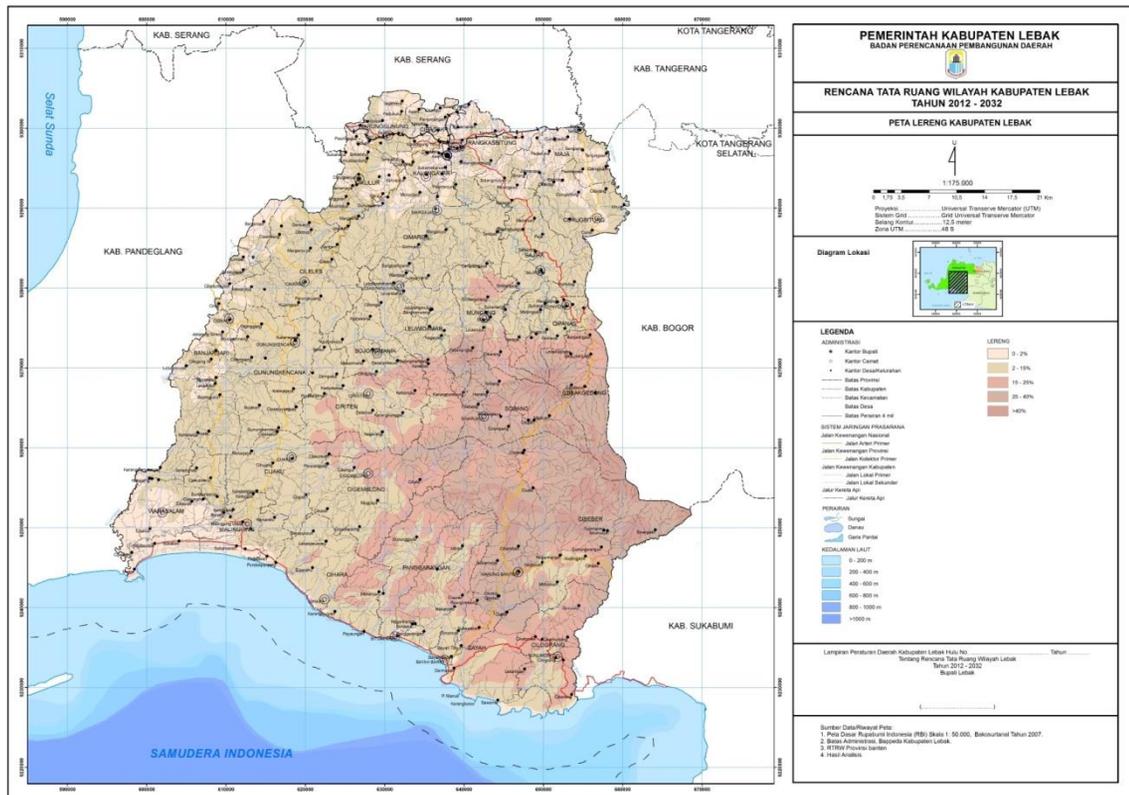
Tabel 2.3
Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Banjarsari	5.625,57	10.329,93				15.955,50
2.	Bayah	996,36	5.453,14	6.415,99	1.511,72		14.377,21
3.	Bojongmanik		7.464,43	2.127,41			9.591,83
4.	Cibadak	3.134,19	498,53				3.632,71
5.	Cibeber		2.672,42	6.235,67	23.887,95	7.300,37	40.096,41
6.	Cigemblong		7.416,31	5.511,57	2.377,06		15.304,93
7.	Cihara	689,76	9.256,39	2.523,71			12.469,86
8.	Cijaku		10.382,92	1.085,49			11.468,42
9.	Cikulur	2.351,74	3.831,23				6.182,97
10.	Cileles	1.168,34	14.170,41				15.338,76
11.	Cilograng	177,61	2.693,58	6.034,87	695,66		9.601,72
12.	Cimarga	1.686,40	16.663,10	403,15			18.752,65
13.	Cipanas		4.703,95	1.065,33	509,94	246,08	6.525,30
14.	Cirinten		9.237,10	2.907,03	110,83		12.254,96
15.	Curugbitung	1.892,77	7.424,56				9.317,33
16.	Gunungkencana	144,93	13.656,57				13.801,50
17.	Kalanganyar	1.817,11	1.042,23				2.859,34
18.	Lebakgedong		56,69	3.510,67	3.614,18	1.978,43	9.159,98
19.	Leuwidamar		9.989,00	3.378,52	921,99	15,59	14.305,09
20.	Maja	5.199,86	2.617,28				7.817,14
21.	Malingping	3.501,62	6.699,84				10.201,47
22.	Muncang		3.709,38	2.795,32	1.453,04	737,64	8.695,38
23.	Panggarangan	604,33	7.677,02	8.320,45	1.075,05	38,67	17.715,51
24.	Rangkasbitung	4.573,24	2.736,47				7.309,71
25.	Sajira	637,24	9.229,80	599,60			10.466,64
26.	Sobang			1.852,88	7.452,98	1.843,48	11.149,34
27.	Wanasalam	7.933,32	3.485,70				11.419,02
28.	Warunggunung	2.994,66	1.741,87				4.736,53
	Jumlah	45.129,04	174.839,83	54.767,64	43.610,41	12.160,25	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.3
Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan.

1. Dataran, tersebar di bagian, utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,
2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur Kabupaten Lebak,
3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur Kabupaten Lebak,
4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak
5. Gunung/Pegunungan, 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.



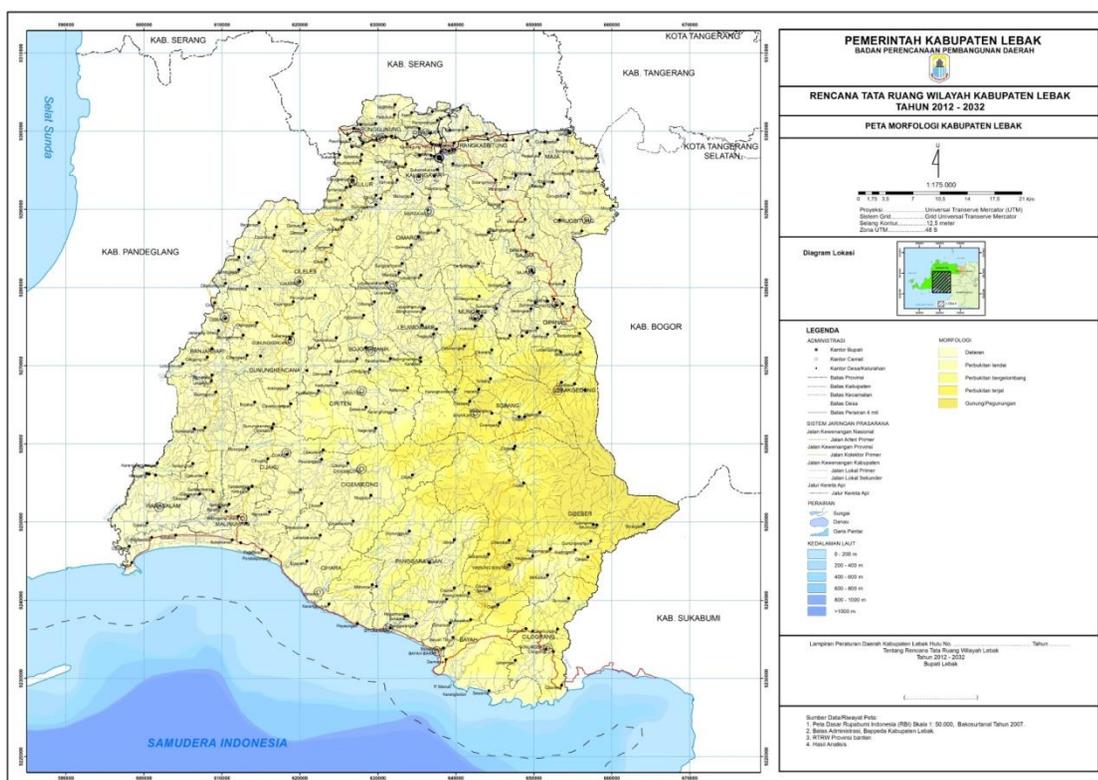
Tabel 2.4
Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
1.	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
2.	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14.377,21
3.	Bojongmanik	919,7	8.672,13	2.129,68			9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
6.	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
7.	Cihara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
8.	Cijaku	6.529	3.864,06	1.075,36			11.468,42
9.	Cikukur	5.348,01	834,96				6.182,97
10.	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
11.	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
12.	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
13.	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
14.	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95
15.	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
16.	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
17.	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
18.	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98
19.	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
20.	Maja	7.806,53	10,61				7.817,14
21.	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
22.	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
23.	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
24.	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
25.	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
26.	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34
27.	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
28.	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
	Jumlah	132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.4
Peta Morfologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara hidrologi, Kabupaten Lebak dilalui oleh 3 Wilayah Sungai (WS) yaitu Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliman-Cibungur dan Cibaling-Cisawarna, 16 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 183 sungai sepanjang 2.701 Km, dengan rincian sebagaiberikut:

- 16 sungai ordo 1 sepanjang 877,40 Km.
- 62 sungai ordo 2 sepanjang 900,60 Km.
- 43 sungai ordo 3 sepanjang 417,60 Km.
- 45 sungai ordo 4 sepanjang 368,70 Km.
- 11 Sungai ordo 5 sepanjang 97,46 Km.
- 6 sungai ordo 6 sepanjang 46,53 Km.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km² dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung



terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu: Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km², Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km², Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km² dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada disebelah hilir kota Rangkasbitung yaitu Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor dan Sungai Ciyapah.

Berdasarkan klimatologi, Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara Kabupaten Lebak. Komposisi luasan curah hujan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

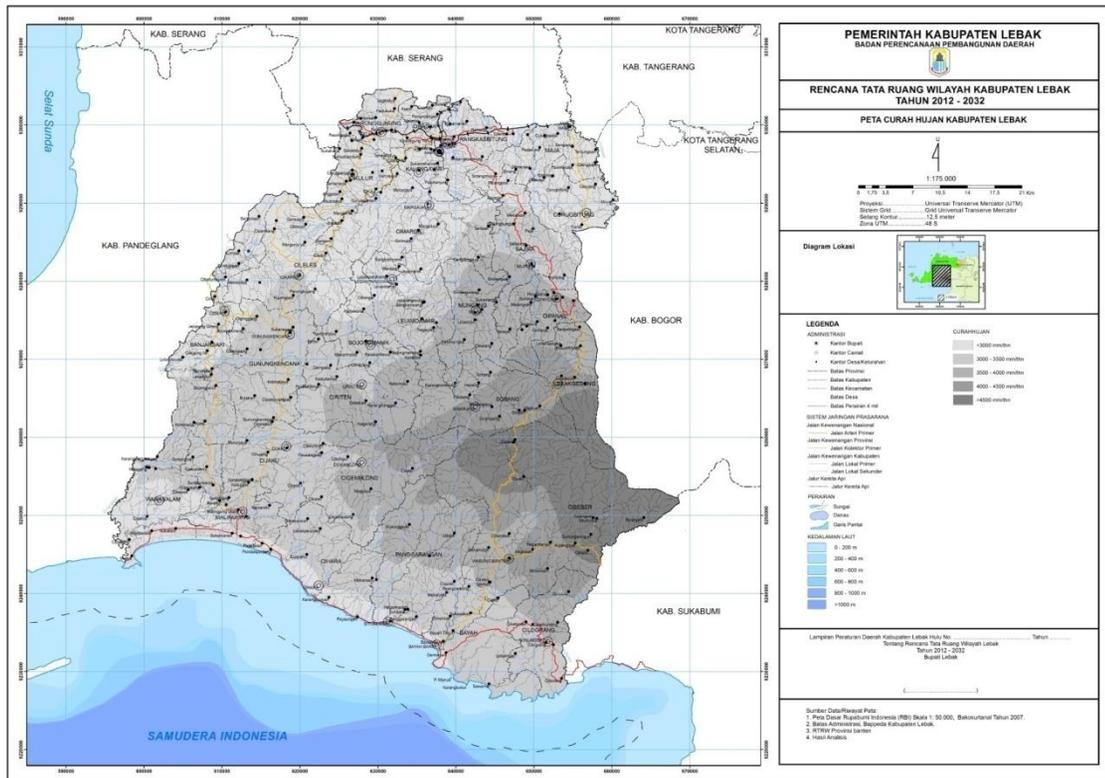
Tabel 2.5
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/thn	3000-3500 mm/thn	3500-4000 mm/thn	4000-4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1.	Banjarsari	8.865,94	7.089,57				15.955,50
2.	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32		14.377,21
3.	Bojongmanik	1.845,33	5.293,18	2.453,32			9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber		805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
6.	Cigemblong		5.050,35	6.644,39	3.610,20		15.304,93
7.	Cihara	3.606,75	8.859,12	3,99			12.469,86
8.	Cijaku		10.373,16	1.095,25			11.468,42
9.	Cikulur	6.182,97					6.182,97
10.	Cileles	12.531,75	2.807,01				15.338,76
11.	Cilograng		4.826,32	3.372,11	1.403,28		9.601,71
12.	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47			18.752,65
13.	Cipanas		346,96	5.384,33	794,01		6.525,30
14.	Cirinten		6.145,69	5.830,76	278,51		12.254,95
15.	Curugbitung	7.773,78	1.543,55				9.317,33
16.	Gunungkencana	770,79	13.030,71				13.801,50
17.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
18.	Lebakgedong			2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
19.	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71		14.305,09
20.	Maja	7.817,14					7.817,14
21.	Malingping	3.441,11	6.760,36				10.201,47
22.	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91		8.695,38
23.	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09		17.715,51
24.	Rangkasbitung	7.309,70					7.309,70
25.	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06			10.466,64
26.	Sobang			2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,34
27.	Wanasalam	7.894,92	3.524,10				11.419,02
28.	Warunggunung	4.736,53					4.736,53
	Jumlah	102.126,88	109.158,50	61.414,54	30.392,23	27.415,00	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak





Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan																Total (Ha)
	Hutan Belukar	Hutan Lebat	Kampung	Kebun Campuran	Padang Rumput/Sabana	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Perumahan	Rawa	Sawah Irigasi 1xpadi/th	Sawah Irigasi 2xpadi/th	Sawah Tadah Hujan	Semak	Sungai/Danau	Tanah Rusak	Tegalan/Ladang	
Banjarsari	2,575.40		713.90	7,895.27	136.89	231.86	1,238.76		1.91	944.81	1,457.96	0.00	421.64	132.64		204.46	15,955.50
Bayah	2,876.13		770.39	7,155.95	0.52	494.35	1,542.38			1,004.82	123.72			141.43	0.30	267.23	14,377.21
Bojongmanik	644.03		192.11	1,762.14	0.69		5,457.05			1,119.09	228.94			72.97		114.82	9,591.83
Cibadak			389.97	1,456.38	18.30		203.55		5.81	5.63	1,493.74			59.35			3,632.71
Cibeber	14,771.86	702.33	374.00	20,171.70	6.65		2,033.63			1,588.96	19.88	0.01		93.25	1.34	332.81	40,096.41
Cigemblong	2,883.52	294.42	146.69	9,191.74	9.26	373.93				1,590.64	652.63			36.53		125.59	15,304.93
Cihara	1,334.25		190.09	9,228.02						1,194.37	80.17		70.61	59.57		312.78	12,469.86
Cijaku	766.99		213.69	7,854.70	1.96		835.56			1,062.28	718.45		0.41	6.26		8.12	11,468.42
Cikulur			493.66	533.40	12.64		2,868.29			411.85	1,828.45			34.70			6,182.97
Cileles	1,728.06		476.76	8,165.05	7.39	1,448.59	1,669.07			1,244.27	425.93			39.55		134.09	15,338.76
Cilograng	4,332.57		255.23	3,990.42			213.92			457.89	80.49			43.39		227.81	9,601.72
Cimarga	3,936.36		572.10	3,264.82	24.41	2,603.51	4,489.63			2,038.27	1,430.38			232.42		160.74	18,752.65
Cipanas	97.80	126.42	290.35	3,856.88	3.67	0.09	81.08			1,356.23	625.59	0.15	0.03	81.07	5.96		6,525.30
Cirinten	411.22	87.77	155.94	8,543.38	0.44		675.58			996.88	1,132.24			14.22		237.29	12,254.96
Curugbitung			481.86	5,587.48		0.07	1,223.19			164.82	1,732.64	51.84	0.08	46.72		28.62	9,317.33
Gunungkencana	4,414.29		377.33	5,581.55	1.38		1,067.00			1,217.44	700.39		107.86	40.30		293.95	13,801.50
Kalanganyar			229.96	998.95			489.96			128.42	794.88			75.41		141.77	2,859.34
Lebakgedong		291.38	104.56	6,491.70		0.03	390.10			725.40	80.45	0.00	0.03	32.43		1,043.90	9,159.98
Leuwidamar	1,618.42	201.52	451.01	2,500.83	10.60		7,724.19			947.63	386.20			129.18		335.50	14,305.09
Maja			645.53	2,676.29	15.06	1,203.90	663.72			314.80	2,147.90			76.61		73.32	7,817.14
Malingping	685.85		557.15	5,405.13	9.13		620.29		95.78	1,480.47	572.08		630.86	64.36	61.55	18.82	10,201.47
Muncang	168.46	122.47	159.05	2,711.22		258.32	2,166.30			2,106.14	699.85			80.20		223.35	8,695.38
Panggarangan	5,937.06		263.55	7,098.42	1.17		2,848.43			975.39	409.23			181.74		0.53	17,715.51
Rangkasbitung			933.24	2,016.75	67.55	2,526.79		84.38		240.73	1,314.24			104.47		21.55	7,309.71
Sajira	29.62		395.31	6,434.43	35.86	231.87	1,151.50			552.16	1,495.37			140.51			10,466.64
Sobang	1,106.89	1,308.57	131.79	4,946.75			716.92			2,813.84				68.31		56.27	11,149.34
Wanasalam	57.29		358.82	4,562.66	10.16		1,498.33		16.89	233.24	3,687.34		710.93	118.04	165.31	0.03	11,419.02
Warunggunung			460.08	1,201.46	4.01		959.64			9.52	2,101.82						4,736.53

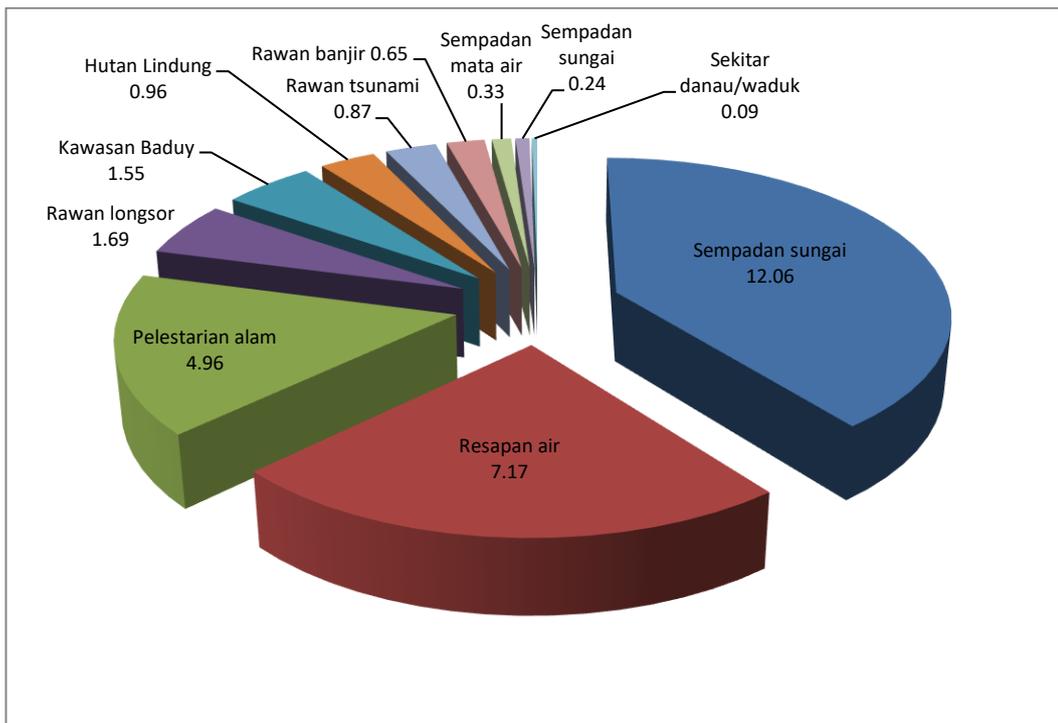


a. Potensi Pengembangan Wilayah

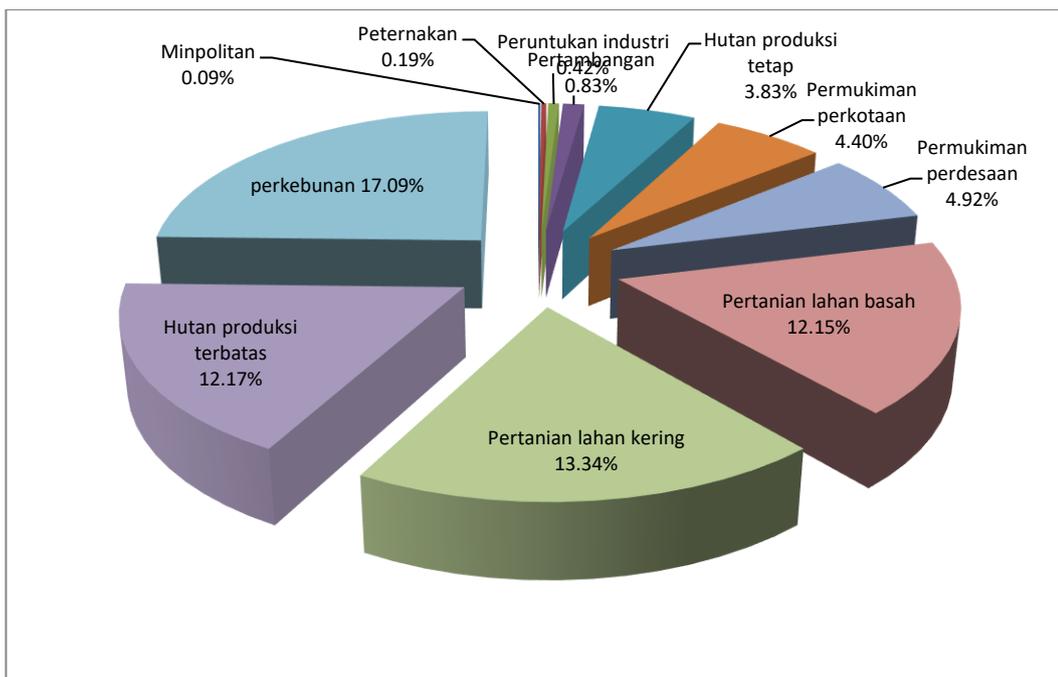
Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sumber daya alam, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk pula ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang baik yang direncanakan maupun tidak, pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyerasikan dan mensinkronkan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada di dalamnya dapat mendukung kehidupan masyarakat secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

Sesuai dengan karakteristik wilayah, rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana pola ruang untuk fungsi budidaya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung ditetapkan sebesar 101.029,13 Ha (30,57%) dan kawasan budidaya sebesar 229.478,05 Ha (69,43%) dari luas wilayah kabupaten dengan rincian peruntukan kawasan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.1
Persentase Peruntukan Kawasan Lindung di Kabupaten Lebak



Grafik 2.2
Persentase Peruntukan Kawasan Budidaya di Kabupaten Lebak



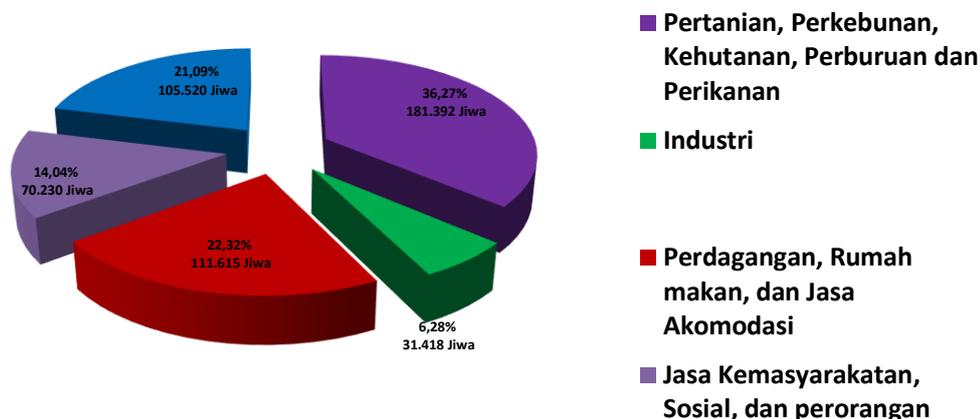
Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034



Berdasarkan pola pemanfaatan ruang yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian budidaya, maka Kabupaten Lebak adalah daerah yang dalam jangka menengah masih akan mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utamanya bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pertanian tanaman pangan yang potensial bahkan tersebar di hampir seluruh kecamatan, menjadikan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan dalam konteks regional di Provinsi Banten. Potensi pengembangan industri berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian memiliki prospek yang sangat tinggi. Demikian pula dengan potensi industri pariwisata, perdagangan, serta UMKM dan koperasi yang masih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan produk-produk pertanian setempat, sehingga terdapat integrasi yang nyata antara upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah di satu sisi dengan upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Implikasi dari konstruksi alamiah pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Lebak, maka sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Data BPS dibawah ini mengkonfirmasi persentase penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 64,69%. Gambaran lengkap tentang sebaran mata pencaharian penduduk Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2.3

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2016

Di samping pertanian, sektor non pertanian yang cukup menonjol di Kabupaten Lebak adalah sektor konstruksi dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen dikarenakan banyaknya kegiatan pembangunan perumahan di kecamatan Maja, kalanganyar dan Rangkasbitung, Pembangunan sarana jalan di wilayah Malingping, Panggarangan, Bayah dan sekitarnya. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah di sektor pemerintahan yang diakibatkan naiknya dana anggaran pembangunan terutama belanja pegawai. Naiknya produktivitas padi hingga mencapai diatas 12 %, tingginya produksi komoditas Ubi Kayu yang mencapai kenaikan 15 % serta peningkatan produksi holtikultura hingga diatas 20 %, menjadi beberapa penyebab tingginya pertumbuhan di kategori Pertanian. Beberapa ragam potensi pariwisata masih dapat dioptimalkan, seperti: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden



berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.

b. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lebak meliputi :

1. Wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia) Kabupaten Lebak,
2. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara Kabupaten Lebak,
3. Daerah rawan longsor, berada di bagian tengah Kabupaten Lebak, dan
4. Wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara Kabupaten Lebak.

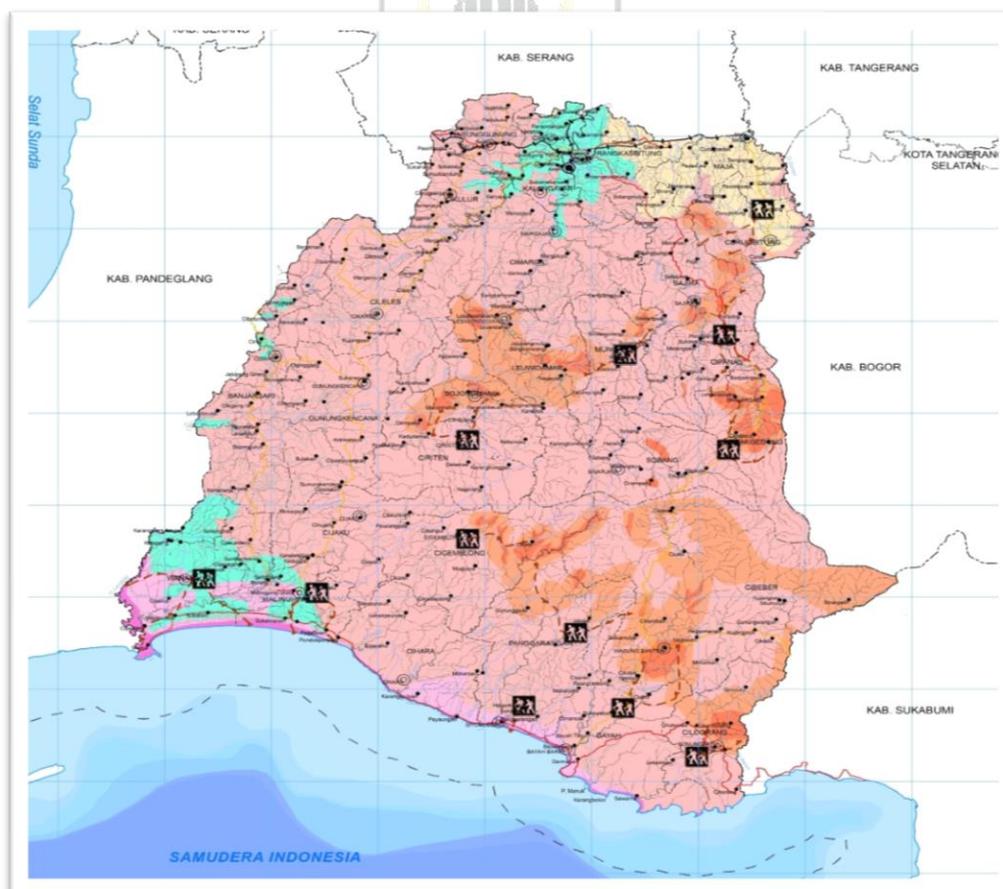
Tabel 2.7
Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
1.	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
2.	Bayah		13.004,72		1.372,49	14.377,21
3.	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
4.	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
5.	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
6.	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
7.	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
8.	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
9.	Cikukur	5.852,11		330,87		6.182,97
10.	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
11.	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71
12.	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
13.	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
14.	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
15.	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
16.	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
17.	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
18.	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
19.	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
20.	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
21.	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
22.	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
23.	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
24.	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
25.	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
26.	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
27.	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
28.	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
	Jumlah	106.764,83	192.783,31	18.778,74	12.180,28	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak



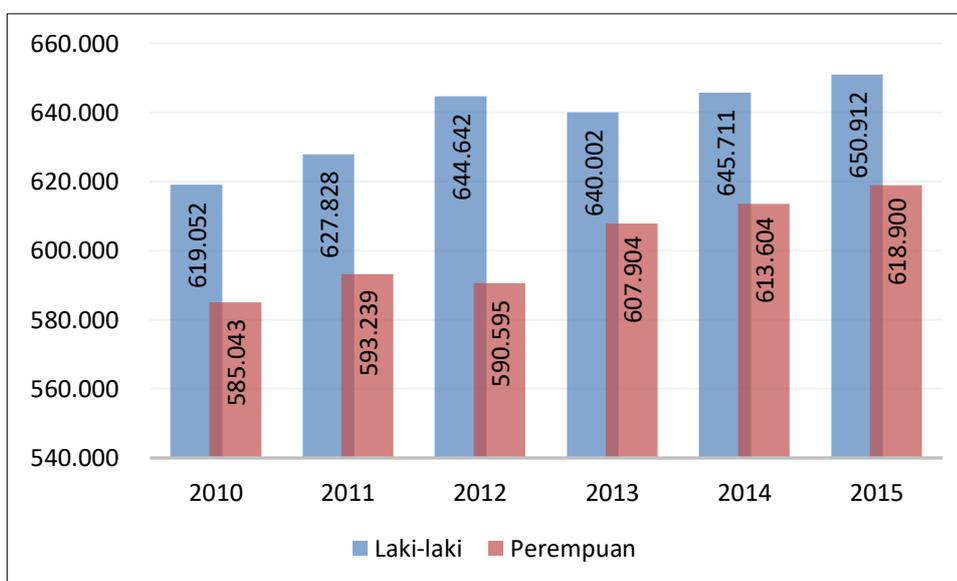
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



2.1.1.2 Demografi

Secara demografis, berdasarkan hasil pendataan Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2012 mencapai 1.235.237 jiwa. Angka ini bertambah menjadi 1.247.906 pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan menjadi 1.259.315 jiwa. Berikut ini digambarkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2012-2014 serta sebaran penduduk berdasarkan kecamatan pada tahun 2014 sebagai berikut.

Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2015

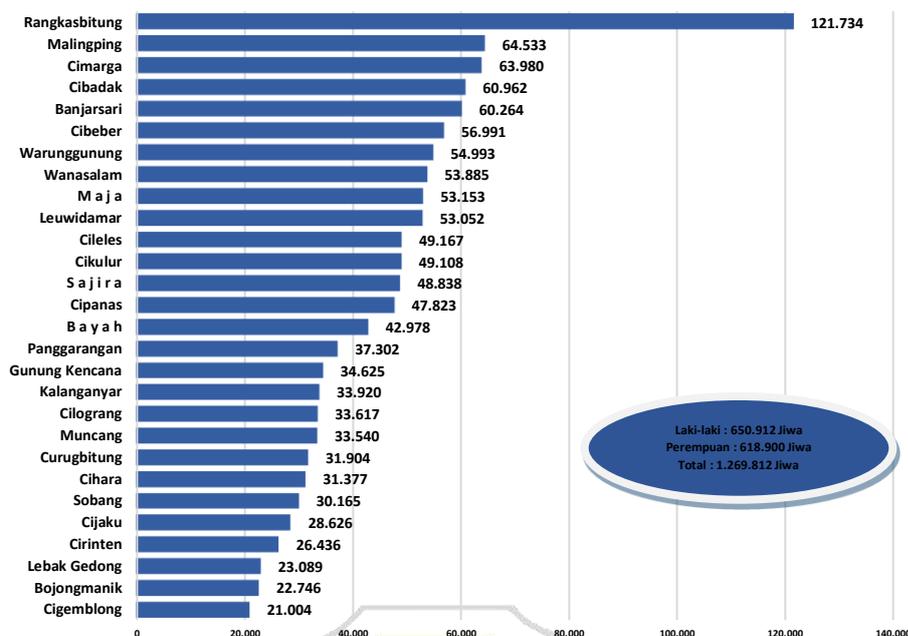


Sumber : BPS Kab. Lebak



Grafik 2.5

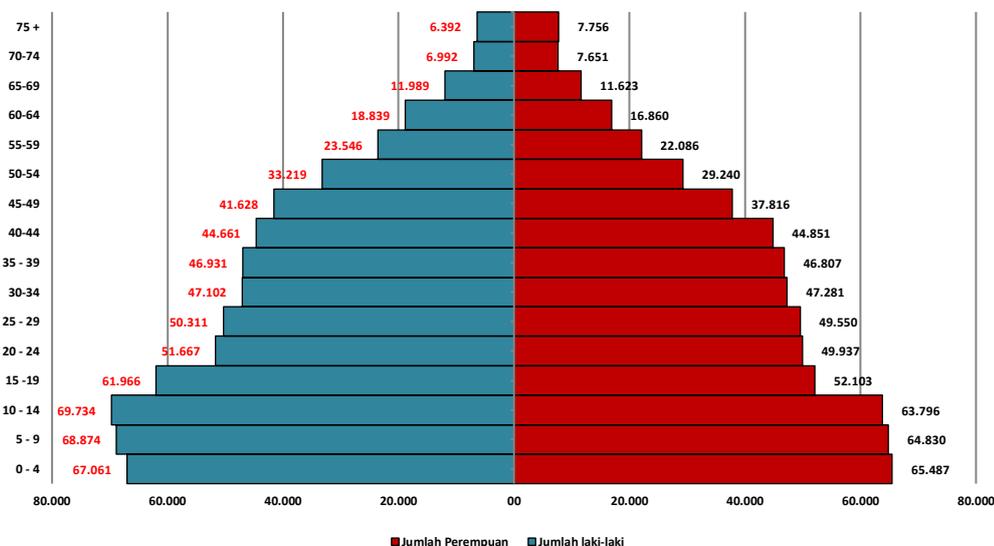
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2015



Sumber : BPS Kab. Lebak, 2016

Sementara bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kabupaten Lebak didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun. Gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat dari piramida penduduk sebagai berikut :

Grafik 2.6
Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2015



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olah raga. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

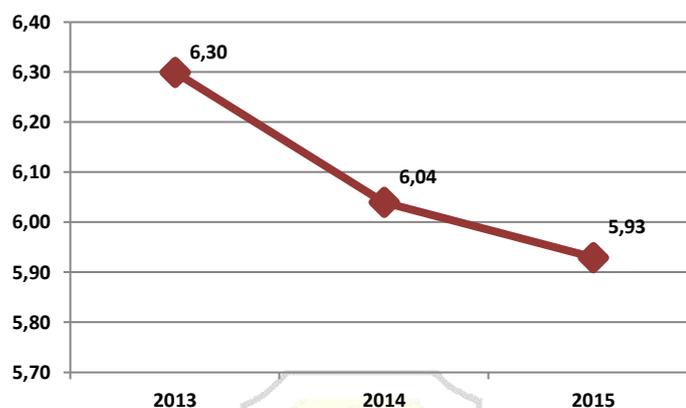
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain : capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan



dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu.

Grafik 2.7
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2013 – 2015



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Grafik di atas, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak selama periode tahun 2013-2015. Secara umum LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan. Namun apabila dilihat Secara total pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah sebesar 5,93 persen. Namun bila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dilihat lebih spesifik menurut kelompok kategori, terlihat bahwa yang mengalami pertumbuhan yang paling besar pada tahun 2015 adalah kategori Primer (pertanian dan Pertambangan) yang tumbuh sebesar 7,56 %. Kemudian diikuti oleh kelompok kategori tersier sebesar 5,27 persen dan yang terakhir adalah kelompok Kategori Sekunder (industri, pengadaan Gas, listrik dan Air) dengan pertumbuhan 4,68 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi di kategori konstruksi mencapai lebih dari 20 persen, yang diakibatkan banyaknya kegiatan di kategori konstruksi diantaranya adalah, pembangunan perumahan di Kecamatan Maja, Kalanganyar dan Rangkasbitung, pembangunan sarana jalan terutama di



Wilayah Selatan (Malingping, Pangarangan, Bayah dan sekitarnya). Kemudian pertumbuhan tertinggi kedua adalah di sektor pemerintahan, naiknya dana anggaran pembangunan terutama output belanja pegawai, menjadi salah satu pemicunya. Selain itu naiknya produktivitas padi hingga mencapai diatas 12%, tingginya produksi komoditas Ubi Kayu yang mencapai kenaikan 15% serta peningkatan produksi hortikultura hingga diatas 20%, menjadi beberapa penyebab tingginya pertumbuhan di kategori Pertanian. Seluruh kategori di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif kecuali industri pengolahan yang tentunya dipengaruhi sebagian besar oleh lesunya industri pengolahan karet/sheet dan industri barang galian bukan logam. Namun ada juga beberapa kategori yang tumbuh melambat yang kebanyakan berada di kelompok kategori tersier yang mencakup hampir seluruh kategori di kelompok tersier kecuali kategori jasa keuangan dan kesehatan. Gambaran mengenai kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:





Tabel 2.8
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013-2015

KATEGORI	2013)	2014)	2015 **)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,02	27,14	28,32
B. Pertambangan dan Penggalan	8,33	8,14	7,4
C. Industri Pengolahan	11,26	10,45	9,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05
F. Konstruksi	4,93	5,83	6,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,35	13,11	12,5
H. Transportasi dan Pergudangan	5,82	6,3	6,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,52	4,83	4,93
J. Informasi dan Komunikasi	0,59	0,61	0,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,67	1,67
L. Real Estate	6,35	6,22	6,23
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,16	5,37	5,64
P. Jasa Pendidikan	6,07	6,25	6,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,04	1,07
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,43	2,61	2,68
Jumlah	100.0 0	100.0 0	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Masih dominannya kontribusi sektor pertanian adalah konsekuensi logis dari karakteristik wilayah Kabupaten Lebak yang berciri agraris. Ketersediaan lahan pertanian dan dukungan tenaga kerja yang cukup berlimpah di sektor ini membuat nilai tambah produk-produk pertanian dominan dalam mempengaruhi pembentukan PDRB Kabupaten Lebak, meski sesungguhnya kapasitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian



kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan.

Seiring perkembangan dan pengaruh perkonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir, adanya rekomendasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT), menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDRB di daerah sehingga dapat memberikan gambaran pergeseran dan pertumbuhan perekonomian terkini yang berimbas kepada peningkatan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan serta menjadikan data tersebut dapat diperbandingkan antar wilayah.

Untuk mengakomodir hal tersebut diatas, maka perhitungan terhadap PDB dan PDRB dilakukan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar yang dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali, telah terjadinya perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008, tersedianya sumber data baru untuk perbaikan perhitungan PDB seperti sensus penduduk tahun 2010 dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk benchmarking atau menetapkan PDRB serta pada tahun 2010 perekonomian relatif lebih stabil.



Gambaran tentang perkembangan PDRB Kabupaten Lebak dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 2.09
**Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2013-2015**

KATEGORI	2013 *)	2014 *)	2015 **)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.058.413,26	4.097.164,94	4.440.916,20
B. Pertambangan dan Penggalian	1.102.410,65	1.130.081,48	1.181.749,15
C. Industri Pengolahan	1.825.499,08	1.851.654,61	1.790.634,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.991,04	10.398,88	10.649,45
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.101,39	9.278,61	9.794,33
F. Konstruksi	744.666,34	924.617,91	1.115.739,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.101.171,88	2.222.629,48	2.285.018,14
H. Transportasi dan Pergudangan	908.455,15	1.011.281,08	1.046.300,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675.197,19	750.343,22	805.508,84
J. Informasi dan Komunikasi	110.460,12	131.108,44	136.645,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	252.302,65	268.550,82	289.132,58
L. Real Estate	1.051.564,96	1.134.664,57	1.191.529,79
M,N. Jasa Perusahaan	46.622,11	50.112,89	52.435,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	687.243,75	755.020,70	825.389,04
P. Jasa Pendidikan	799.623,20	876.156,75	937.454,65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149.679,18	162.827,47	177.475,95
R,S,T,U. Jasa lainnya	356.582,26	400.853,64	425.904,59
PDRB	14.887.984,22	15.786.745,47	16.722.277,47

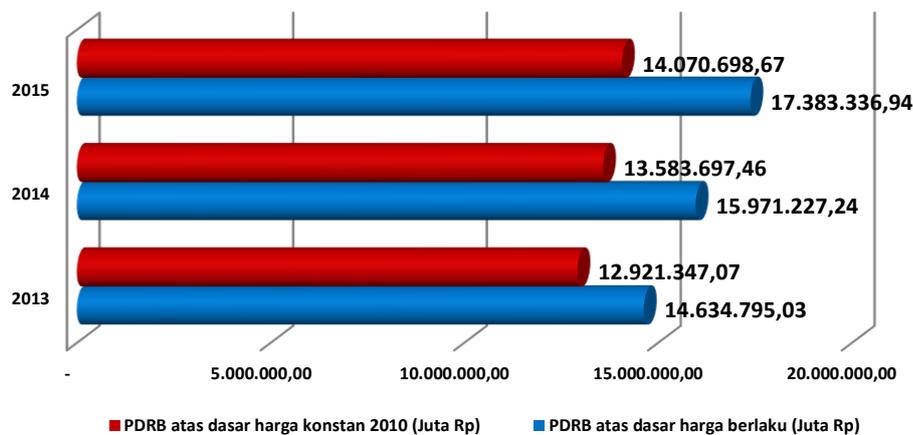
Sumber : BPS Kab. Lebak

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga tercermin dari peningkatan nilai PDRB per kapita baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.8
**PDRB Per Kapita
Kabupaten Lebak 2013-2015**



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2016
) Angka Sementara

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

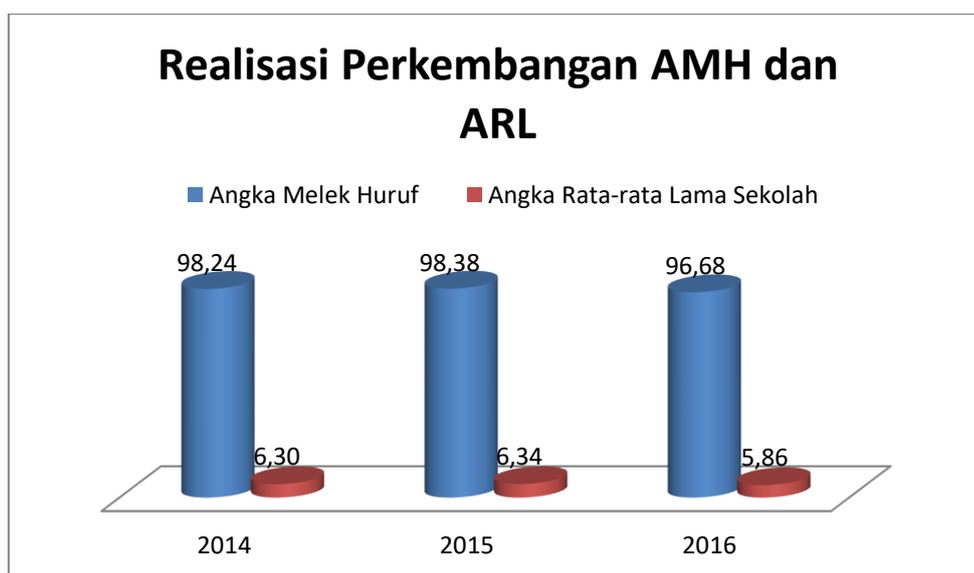
Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya). Data pada dinas terkait menunjukkan penurunan AMH dari tahun ke tahun. Tercatat AMH pada akhir tahun 2014 telah mencapai 98,24%, meningkat cukup memadai menjadi 96,68% pada tahun 2016. Demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah yang dari waktu ke waktu juga mengalami penurunan, dimana pada akhir tahun 2013 RLS di Kabupaten Lebak Rata-rata Lama Sekolah 6,29 tahun. Sedangkan melalui penghitungan metode baru, dimana penghitungan rata-rata lama sekolah dihitung mulai dari usia 25 tahun keatas, maka RLS yang diperoleh pada

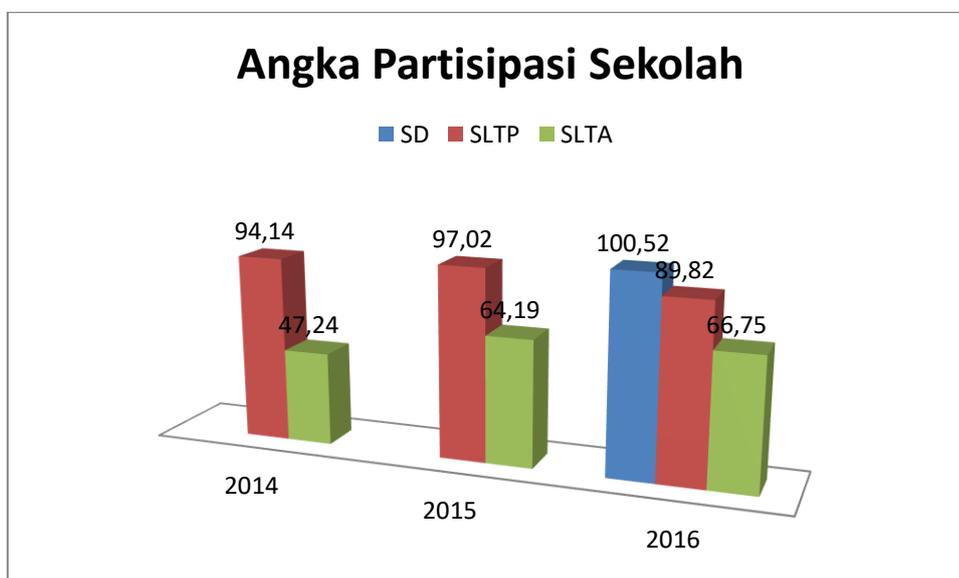


tahun 2014 sebesar 6,30 menjadi 5,86 pada tahun 2016 . Grafik berikut mendeskripsikan capaian AMH, RLS, APS di Kabupaten Lebak pada kurun waktu 2014-2016.

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2016



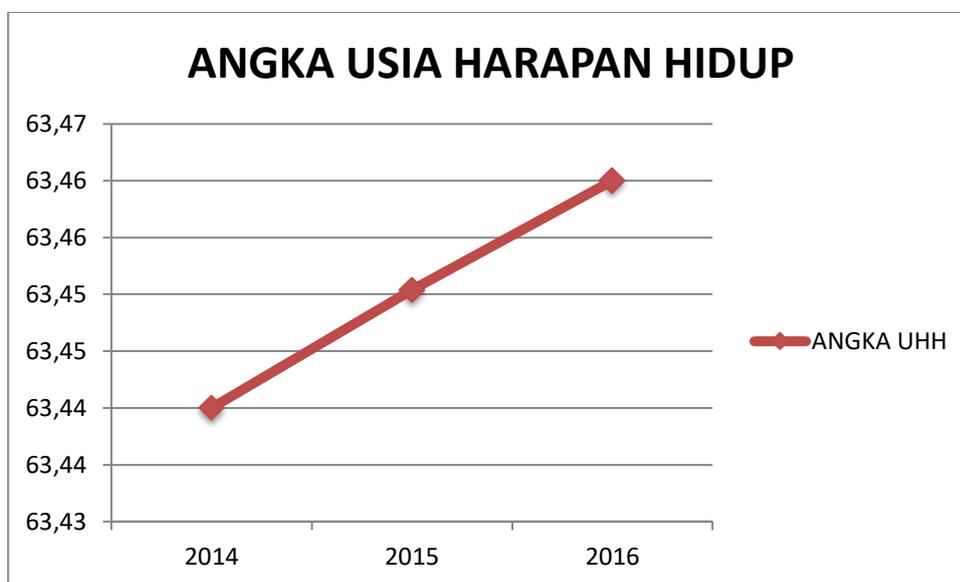
Grafik 2.10
Perkembangan angka partisipasi sekolah (aps) kabupaten lebak tahun 2014 - 2016





Di samping aspek pendidikan, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia lainnya, yaitu Usia Harapan Hidup yang merepresentasi derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Pada tahun 2014, UHH Kabupaten Lebak mencapai angka 63,44 tahun, tahun 2015 naik menjadi 63,45 tahun, pada tahun 2016 menjadi 63,46 tahun. Gambaran tentang kemajuan UHH di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.11
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Lebak 2014-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2017

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan.



Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Sementara itu untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai sarana olahraga, diantaranya kawasan *Sport Center*, kawasan alun-alun Rangkasbitung dan GOR Karta Natanegara. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan pembinaan terhadap organisasi/klub olahraga sebanyak 32 cabang induk olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator pembangunan, maka bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan kondisi eksisting daerah Kabupaten Lebak, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1). Pendidikan

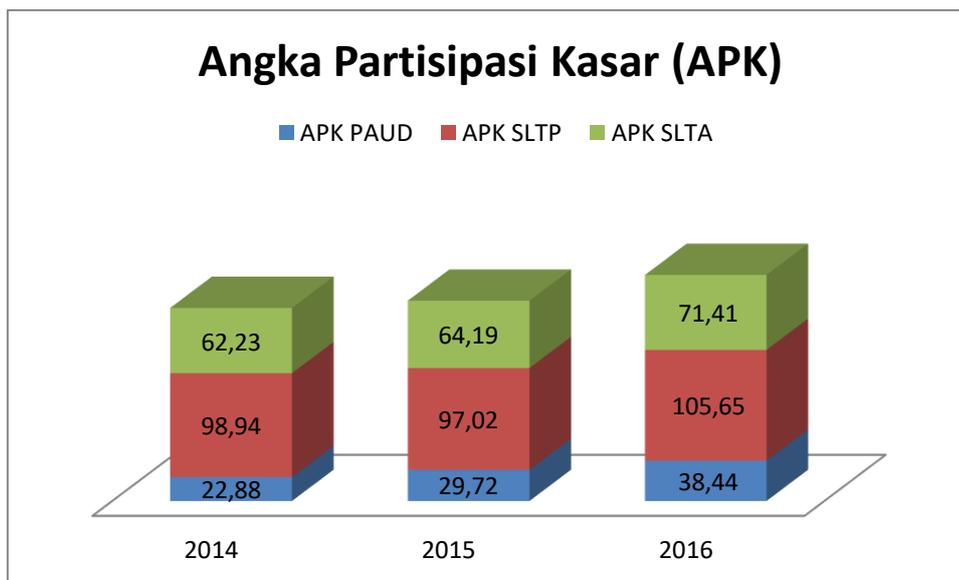
Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Upaya untuk memperluas cakupan layanan pendidikan dasar dan menengah ini dilakukan tidak hanya melalui program pendidikan formal namun juga melalui program pendidikan non formal melalui penyelenggaraan Program Paket A, B dan C. Di samping itu, penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat, penyelenggaraan keaksaraan fungsional, serta kelompok belajar masyarakat juga dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan mengeradikasi buta huruf di kalangan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan guna mengukur efektivitas cakupan layanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan tiap-tiap jenjang pendidikan.



Kebijakan yang terarah dan efektif dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdampak cukup nyata pada meningkatnya APK dan APM di seluruh jenjang pendidikan, meski sejumlah kendala menyebabkan optimalitasnya masih harus ditingkatkan di masa depan. Gambaran tentang perkembangan APK dan APM pada jenjang SD dan sederajat sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini.

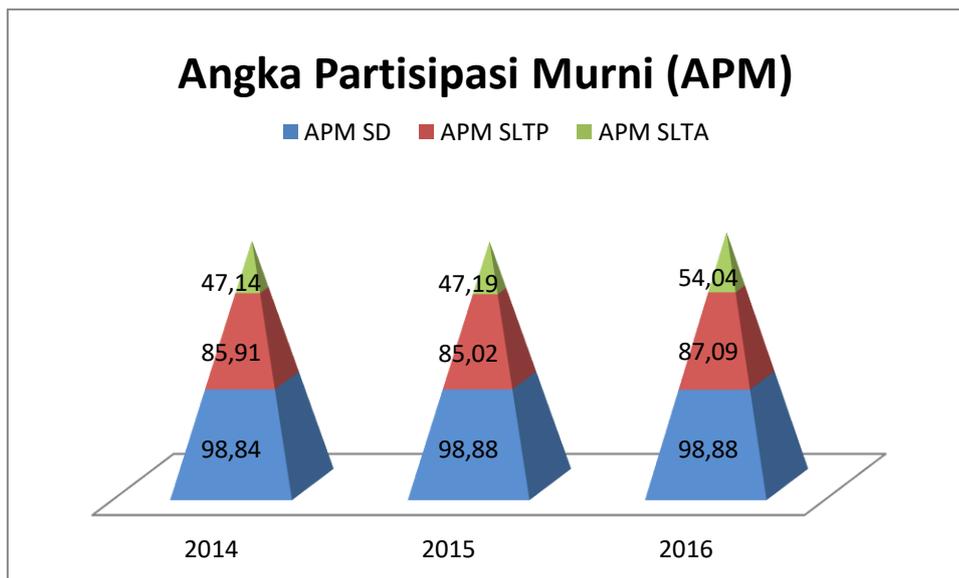
Grafik 2.12

Perkembangan APK Tahun 2014-2016



Grafik 2.13

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2016



2) Kesehatan

Meskipun pada level makro (secara umum) derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak telah terrepresentasi dari Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH) di atas, namun cakupan layanan bidang kesehatan pada level meso (lebih spesifik) dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sepanjang tahun 2014-2016 AKI mengalami fluktuatif. Sedangkan AKB terus mengalami penurunan. Gambaran rinci AKI dan AKB di Kabupaten Lebak pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	21,85	19,80	13,45
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	209,54	179,20	158

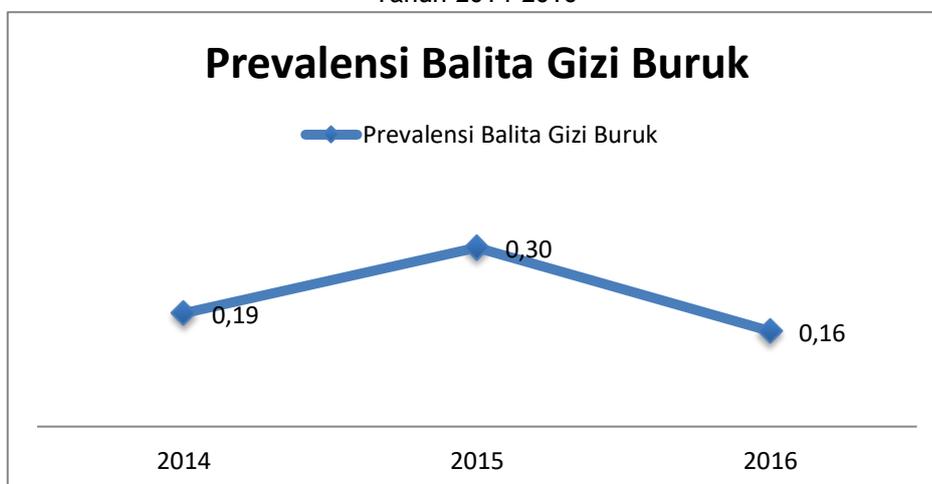
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2017

Selain AKB, indikator menggambarkan kecenderungan kemajuan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak, antara lain terus menurunnya Jumlah anak penderita gizi buruk yang pada tahun 2015



mengalami kenaikan , namun pada tahun 2016 cenderung mengalami penurunan.

Grafik 2.14
Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2017

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan kesehatan di Kabupaten Lebak sebagaimana tergambar dari meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.



Tabel 2.11
Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Puskesmas	40	41	41	41	42	42
2	Puskesmas DTP	14	14	14	14	14	18
2	Jumlah Poliklinik	77	90	101	73	101	139
3	Jumlah Pustu	73	72	70	71	68	68
4	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,06	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07
6	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
7	Cakupan Puskesmas	142,86	146,43	146,43	146,43	150,00	150,00
8	Cakupan Pustu	21,16	20,87	20,29	20,58	19,71	19,71
9	Jumlah Posyandu	1.853	1.956	1.974	1.938	1.929	1.949
10	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	18,21	17,42	18,05	20,75		
11	Jumlah Dokter	270	230	244	105	135	105
12	Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,09	0,12	0,09
13	Jumlah Tenaga Medis	1.929	2.199	2.324		1.091	1.153
14	Rasio Jumlah Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk	1,59	1,83	1,81		0,94	0,97

3) Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan pembangunan, unsur-unsur lingkungan hidup harus tetap diperhatikan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan



lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga pilar tersebut senantiasa perlu ada keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam kenyataannya salah satu pilar yang sering kurang diperhatikan adalah masalah lingkungan hidup. Hal ini terbukti bahwa telah terjadi penurunan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik secara lokal maupun global diantaranya terjadinya banjir, longsor, kekeringan, pemanasan global dan fenomena alam lainnya yang dirasakan akhir-akhir ini sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Salah satu tantangan didalam isu mengenai lingkungan hidup adalah masalah persampahan. produksi sampah yang dihasilkan semakin meningkat Seiring berkembangnya jumlah populasi manusia. Hal ini menjadi perhatian dan membutuhkan penanganan yang mendesak guna mengatasi masalah sampah dengan inovasi teknologi di bidang pengelolaan sampah yang lebih maju sehingga mendukung terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam tabel dibawah tersaji data volume produksi sampah yang ditangani serta rasio TPS persatuan penduduk di Kabupaten Lebak.

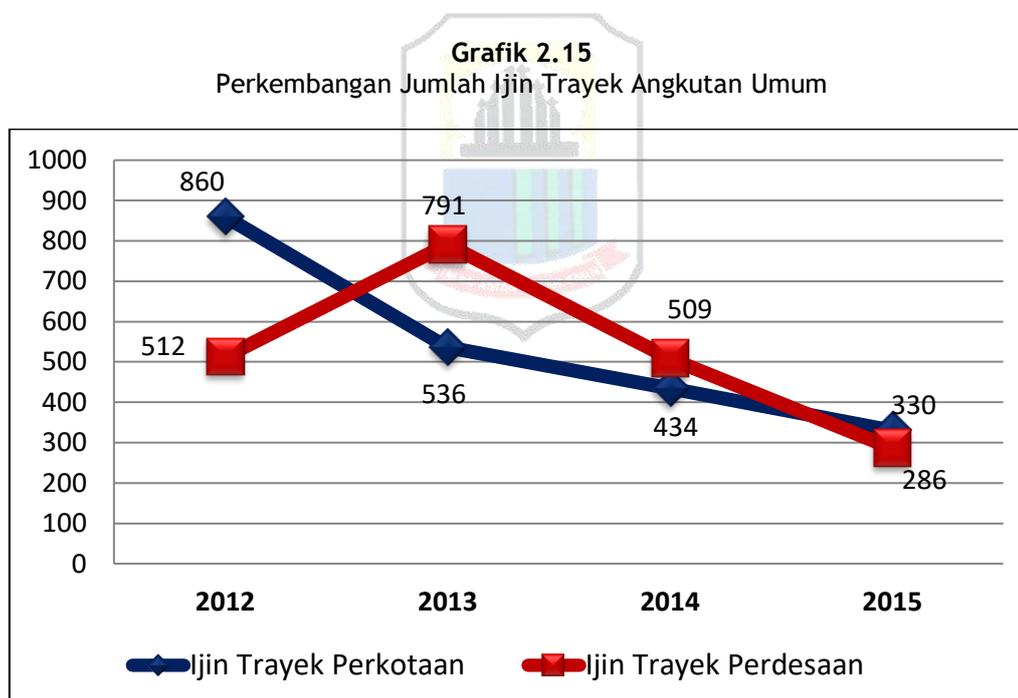
Untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap adanya potensi kerusakan lingkungan hidup sehingga pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan hidup tetap terjaga.

4). Perhubungan



Sektor perhubungan memiliki peranan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penyelenggaraan urusan perhubungan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. Karenanya cakupan layanan sektor perhubungan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum, pelayanan ijin trayek angkutan umum serta pemenuhan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Jumlah ijin trayek angkutan umum tercatat mengalami penurunan. Gambaran fluktuasi perijinan trayek angkutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, 2016

Jumlah terminal di Kabupaten Lebak sebanyak 8 terminal, terdiri dari: 1 terminal tipe B berada di Kecamatan Cibadak dalam pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan 7 terminal tipe C berada di Kecamatan



Rangkasbitung, Kalanganyar, Malingping, Bayah, Wanasalam dan Cipanas.

5). Perumahan dan Kawasan Permukiman

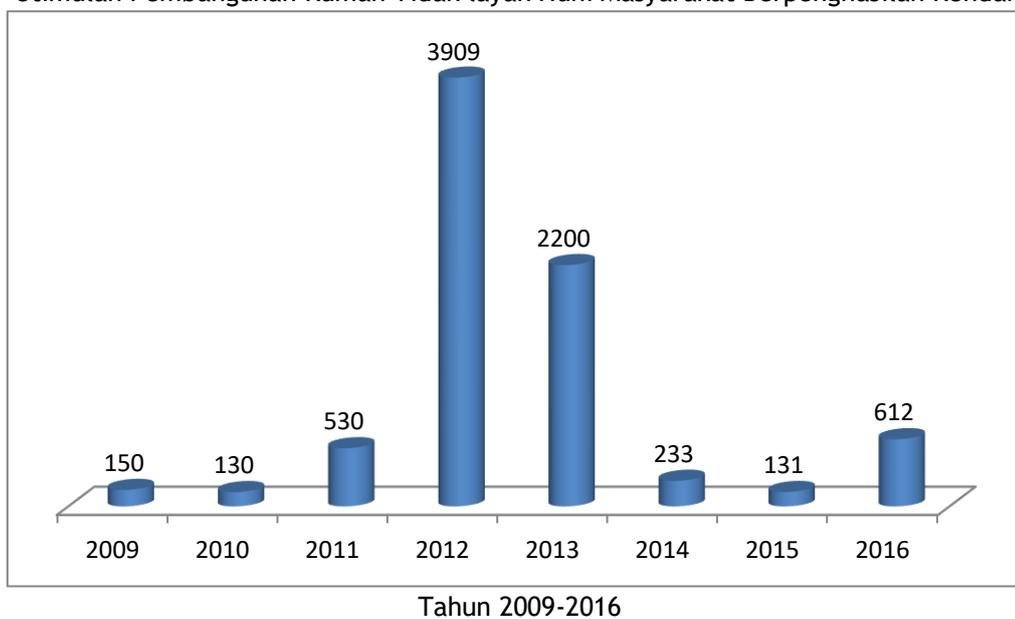
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengertian perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan pendataan tahun 2016, dari 341.603 unit jumlah rumah di Kabupaten Lebak, sebanyak 292.172 diantaranya dalam kondisi layak dan 49.431 unit rumah masuk ke dalam katagori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan rincian 2.157 kondisi rusak ringan, 44.984 rusak sedang dan 2.290 rusak berat. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni, penanganan perumahan masih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata.

Selama kurun waktu 2009-2016 telah dilakukan fasilitasi pembangunan rumah swadaya dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.895 unit rumah.

Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dengan pelibatan masyarakat serta dunia usaha. Di samping itu, percepatan pemenuhan prasarana, sarana dan utuilitas perumahan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman sangat diperlukan.



Tabel.2.16
Stimulan Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah



6). Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat, di wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak untuk proporsi



ruang terbuka hijau sebesar 43,62 %, terdiri dari RTH publik sebesar 34,17% dan RTH privat sebesar 9,44%.

Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau publik di Wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait walaupun sebaran dan penataannya perlu dijaga sesuai dengan rencana tata ruang, untuk RTH privat perlu sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan RTH yang sudah ada di masing-masing pekarangan rumah tinggal, kantor, pertokoan maupun tempat usaha.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan kepada upaya dan fasilitasi serta pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera melalui peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, penguatan peran serta lembaga kemasyarakatan, dan pemerintahan desa.

Kinerja Pembangunan aspek pemerintahan dan pembangunan desa, menunjukkan bahwa pada tahun 2008 telah dibentuk dan ditetapkan 25 desa baru sebagai desa pemekaran, sehingga pada tahun 2009 wilayah kabupaten lebak terbagi atas 28 kecamatan dan 340 desa dan 5 kelurahan. Dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2009 telah dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui diklat yang diikuti seluruh kepala desa.

Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Lebak sebanyak 28.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat ditinjau



dari jumlah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjumlah 51 LSM dan Organisasi Masyarakat sebanyak 87 pada tahun 2011. Tingginya animo masyarakat untuk membentuk organisasi kemasyarakatan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8). Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2010 sebanyak 3.937 org, sedangkan pada tahun 2011 adalah 4.609 org atau meningkat sebanyak 672 org.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 41 kasus pengaduan pelanggaran pada tahun 2007 menjadi 78 kasus pada tahun 2008, dan 42 kasus pada tahun 2009. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih kurang, hal ini disebabkan belum efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan

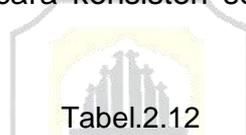


ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2008, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan.

9). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah Koperasi dari periode tahun 2012 – 2016 yang diikuti dengan persentase Koperasi Aktif yang juga mengalami peningkatan secara konsisten selama periode tahun 2012 – 2016.



Tabel.2.12
**PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2010-2016**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Koperasi Aktif	618	645	657	671	689	709	736
2.	Jumlah Koperasi	726	753	769	779	791	811	833
3.	Persentase Koperasi Aktif	85,12	85,66	85,44	86,14	87,10	87,42	88,36

Aktifitas Perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak tidak terlepas dari kegiatan usaha masyarakatnya, sehingga kondisi usaha dalam hal ini usaha mikro keci dan menengah (UMKM) dapat mencerminkan kondisi perekonomian masyarakatnya, fakta menunjukkan bahwa aktifitas usaha yang ada di masyarakat Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa usaha mikro adalah usaha yang menjadi tumpuan masyarakat hal ini ditunjukkan dengan data bahwa sektor mikro mendominasi dari tahun ke tahunnya (2014 – 2015)

Tabel 2.13
Jumlah UMKM di Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2016



No	Uraian	2014	2015	2016
1	Mikro	492,05	48892	49,143
2	Kecil	538	785	845
3	Menengah	17	9	15
	Jumlah	49.760	49.686	50.003

Pemberian kredit UMKM di Kabupaten Lebak memiliki trend yang terus meningkat seperti pada tabel di bawah ini. Kedua jenis pinjaman, baik modal kerja maupun kredit investasi memiliki trend yang meningkat, kecuali pada tahun 2015 pemberian kredit investasi terlihat menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel 2.14
Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Diberikan Bank Umum Menurut Kota / Kabupaten Dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek Di Kabupaten Lebak (Juta Rp)

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Modal Kerja	637.784	752.149	813.933	864.386	881.626
Investasi	62.431	111.631	129.567	160.902	153.226
Tidak Teridentifikasi	-	-	-	-	-
Total	700.214	863.780	943.500	1.025.288	1.034.852

Sumber: Bank Indonesia

Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan pinjaman dari bank umum dan BPR di Kabupaten Lebak, dari 2011 sampai 2015 trend pinjaman yang diberikan oleh bank umum dan BPR memiliki trend yang meningkat. Sektor industri yang merupakan sektor lain yang mendapatkan pinjaman cukup banyak dari perbankan, memperlihatkan angka yang fluktuatif dan pada tahun 2015 pinjaman yang diberikan memiliki nilai yang lebih kecil dari pada tahun 2014.

Tabel 2.15
Posisi Kredit Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek Di Kabupaten Lebak (Juta Rp)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	14,604	24,027	8,101	12,951	12,716
Pertambangan dan Penggalian	5,572	1,990	4,725	3,561	5,338
Industri Pengolahan	99,061	79,531	87,925	102,585	86,821
Listrik, Gas dan Air	3,818	115	205	286	265
Konstruksi	19,907	51,006	22,567	14,435	62,157
Perdagangan, Hotel dan Restoran	425,579	530,618	688,244	765,234	740,631
Pengangkutan dan Komunikasi	26,897	21,425	23,049	21,356	15,462
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	52,206	91,017	86,889	70,714	57,421
Jasa-jasa	52,569	64,052	21,794	34,166	54,041
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-
	700,214	863,780	943,500	1,025,288	1,034,852



Sumber : Bank Indonesia

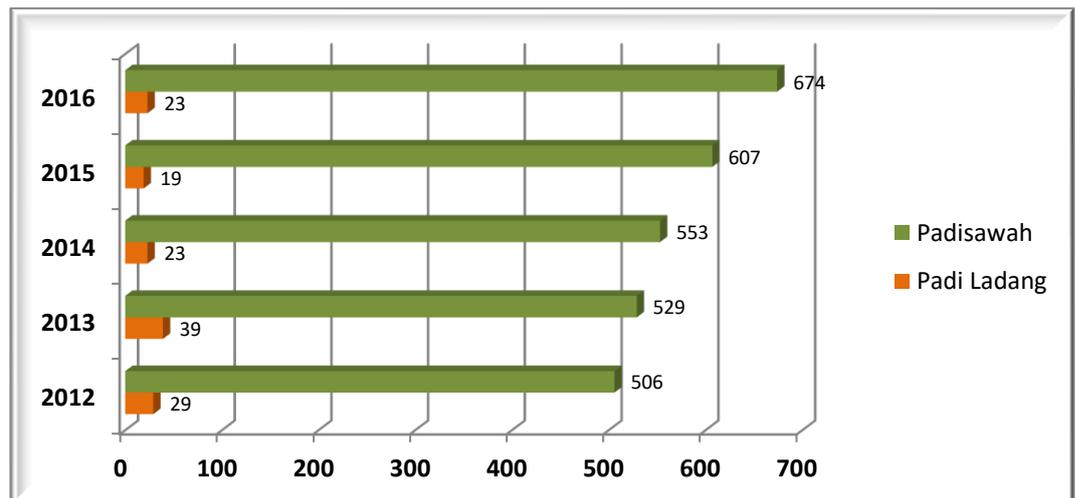
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian dan Perkebunan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lebak, Sektor Pertanian menjadi sektor dominan dengan pemanfaatan lebih dari 50%. Selain dari pemanfaatan ruang, sektor pertanianpun memberikan kontribusi yang dominan juga pada struktur perekonomian Kabupaten Lebak, data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada struktur ekonomi dari tahun ketahun menunjukkan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Banten, produksi padi di Kabupaten Lebak merupakan komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Produksi padi cenderung meningkat setiap tahunnya yang rata-rata mencapai 5% pada kurun waktu tahun 2012-2016, dari 535 ton pada tahun 2012, menjadi 698 ton pada tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat secara detail pada grafik berikut ini.

Grafik 2.17
Produksi Padi di Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2016 (Dalam Ribuan Ton)



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, 2017

*) Angka Perkiraan

Di samping padi, Kabupaten Lebak juga menghasilkan komoditas pertanian yang lain, seperti Palawija, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan, Dari sekitar 15 jenis komoditas perkebunan yang diusahakan, enam komoditas diantaranya menjadi unggulan Kabupaten Lebak yaitu, Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Aren Cengkeh, Kopi Robusta.

Tabel 2.16

Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2015

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Harga (Rp.)	Wujud Produksi
1	Karet	14.838,67	5.100,50	752,06	4.000	lump
2	Kelapa Dalam	21.298,00	12.906,55	832,68	7.500	Kopra
3	Kakao	3.500,05	1.766,50	1.135,39	29.000	Biji Kering
4	Kelapa Hibrida	270,95	295,56	2.688,10	7.500	Kopra
5	Kelapa Sawit	3.802,00	5.770,00	2.165,10	1.500	Tbs
6	Cengkeh	6.169,95	2.905,00	605,21	115.000	Bunga Kering
7	Aren	2.759,00	1.780,00	1.138,11	18.000	Gula Aren
8	Lada	333,57	27,00	147,72	140.000	Lada kering
9	Pandan	367,32	345,50	1.545,86	5.000	Daun kering
10	Panili	28,40	2,00	156,25	300.000	Biji kering
11	Jambu Mete	1,95	1,50	882,35	-	Gelondong Kering
12	Teh	31,50	20,32	1.161,14	-	Daun Kering
13	Jarak Pagar	152,00	80,00	919,59	-	Biji Kering



14	Kapok	114,55	30,00	298,49	-	Serat kering
15	Kopi Robusta	1.658,50	580,00	400,66	18.500	Biji Kering
JUMLAH		55.326,41	31.610,44		190.600,00	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2016

Tabel 2.17
Produksi Palawija, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan
Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Palawija	22.576	25.386	37.697
2	Hortikultura	159.037	189.569	196.071
3	Tanaman Perkebunan	31.287	31.610	31.960

Sebagai daerah yang memiliki areal pertanian yang cukup luas, Kabupaten Lebak memiliki daya dukung lahan yang potensial untuk pengembangan sektor peternakan sehingga dapat kita lihat pertumbuhan sektor Peternakan memiliki trend yang positif selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 – 2016.

2.) Peternakan

Berdasarkan total produksinya pada tahun 2012-2016, daging ayam ras adalah komoditas unggulan di sektor peternakan, diikuti daging ayam buras, kerbau dan sapi potong. Tabel berikut menggambarkan produksi komoditas sektor peternakan pada tahun 2012-2016 yang terdata di dinas terkait.

Tabel 2.18
Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2016
(Dalam Ribu Ton)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016	
						Daging	Jumlah Ternak Yang Dipotong (Ekor)
1	Sapi	125.518	126.814	219.454	618.755	216.053	1.614



2	Kerbau	894.620	1.031.109	879.591	985.045	889.594	6.646
3	Kambing	172.001	172.424	183.936	275.028	191,344	23.054
4	Domba	113.781	130.476	141.707	353.846	227,743	21.087
5	Ayam Buras	1.660.979	1.574.868	1.571.245	709.703	1,714,448	1.993.544
6	Ayam Ras Pedaging	4.489.388	4.372.182	5.051.432	5.103.707	5,014,598	4.322.930
7	Ayam Ras Petelur	74.942	74.942	74.854	65.766	6 7,136	45.671
8	Itik	22.994	20.876	20.922	48.900	2 6,239	29.817
9	Itik Manila/Entog	70.775	38.793	38.889	53.771	5 8,461	49.127
Total		7.624.998	7.542.484	8.182.030	8.214.521	8,405,616	6.493.490

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, 2017

5) Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 tercatat sebanyak 8.950.010 kg. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 16,3kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lebak. Gambaran produksi ikan dan konsumsi ikan per kapita terlihat pada Tabel 2.15 berikut.

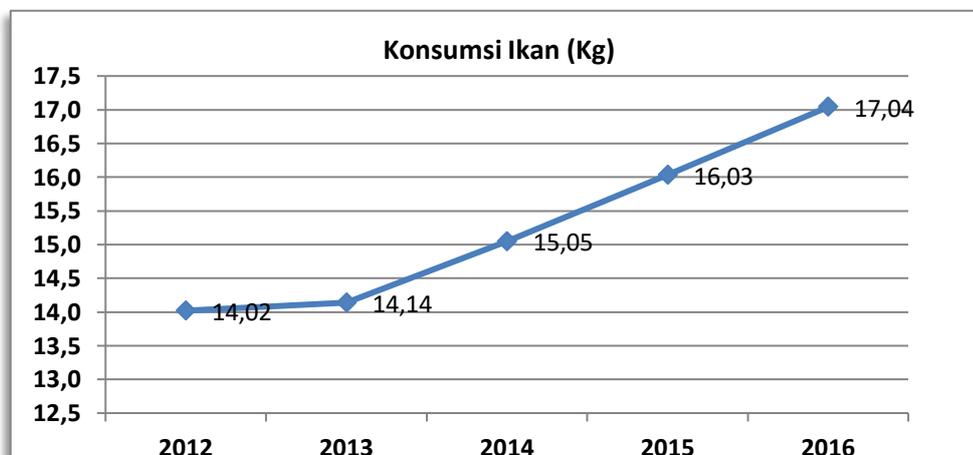
Tabel 2.19
Jumlah Produksi Ikan
di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2016

NO	JENIS USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
I	BUDIDAYA IKAN					
1	Ikan Kolam	2.885.200	2.934.700	2.951.460	2.940.800	2.965.000
2	Ikan Sawah	26.020	7.200	6.800	7.100	7.500
3	Ikan Keramba	55.000	56.700	57.200	57.300	59.600
4	Ikan Kolam Air Deras	39.800	13.500	2.040	1.400	0
5	Ikan Jaring Apung	503.000	502.900	506.600	525.400	512.200
6	Ikan Tambak	17.700	20.400	20.600	20.600	21.300
JUMLAH I		3.526.720	3.535.400	3.544.700	3.552.600	3.565.600
II	PENANGKAPAN IKAN					
1	Penangkapan Ikan Laut	4.616.027	4.734.256	4.968.048	5.373.780	5.508.510
2	Perairan Umum	5.610	1.054	1.370	23.630	1.310
JUMLAH II		4.621.637	4.735.310	4.969.418	5.397.410	5.509.820



JUMLAH TOTAL	8.148.357	8.270.710	8.514.118	8.950.010	9.075.420
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Grafik 2.18
**Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2016**



Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Lebak, 2017

6). Perdagangan

Di sektor perdagangan dan perindustrian, perkembangan sarana perdagangan terutama pasar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah pasar sebanyak 26 unit

7). Perindustrian

Di Kabupaten Lebak, industri umumnya berskala kecil. Pada tahun 2013, terdapat 15.298 unit industri kecil dan 24 unit industri menengah, dan semakin meningkat pada tahun 2016 menjadi 16.381 unit industri kecil. Dan 30 unit industri menengah.

8). Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan kebijakan multisektor. Sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Kabupaten Lebak dalam peningkatan ekonomi masyarakat, mengingat peran sektor pariwisata diyakini dapat memberikan dampak yang positif terhadap

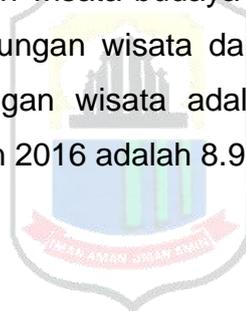


perekonomian daerah dan memiliki daya ungkit yang kuat untuk peningkatan ekonomi masyarakat

Apabila melihat Struktur Ekonomi Kabupaten Lebak dari tahun 2012 – 2014 memang sektor pariwisata (subsektor di PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan minum serta Jasa Lainnya) memberi kontribusi masih kecil rata – rata hanya 3%, namun memiliki trend yang positif dimana terjadi peningkatan pada setiap tahunnya.

saat ini Kabupaten Lebak memiliki 23 DTW yang akan menjadi andalan untuk dikembangkan Selain itu juga dapat kita lihat dari trend positifnya jumlah kunjungan wisata baik Nusantara ataupun Mancanegara dari tahun 2014 sebanyak 54.724 Wisatawan, 2015 sebanyak 69.880 Wisatawan dan 2016 sebanyak 352.576 Wisatawan.

Dari 23 DTW yang akan dikembangkan ada 2 DTW yang menjadi unggulan yaitu Sawarna dan wisata budaya Baduy, khusus untuk wisata budaya Baduy jumlah kunjungan wisata dari tahun 2014 – 2016, pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisata adalah 2.500 Wisatawan, 2015 adalah 3.181 wisatawan dan 2016 adalah 8.966 wisatawan.





2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Lebak merupakan sentra penghasil gula aren dengan jenis produk gula semut dan cetak yang telah memiliki sertifikat makanan organik internasional sehingga dapat menembus pasar Belanda, Italia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Kelebihan gula aren Lebak, selain organik yang menyehatkan juga cocok dijadikan pemanis berbagai jenis bahan makanan dan minuman. Produksi gula aren yang diekspor ke pasar mancanegara diperkirakan mencapai 50-70 ton per bulan, yang dikumpulkan dari Kecamatan Sobang, Panggarangan, Cigemblong, Cihara, Cibeber, dan Muncang.

Di sektor pertambangan, Kabupaten Lebak juga potensial dalam menghasilkan beragam produksi bahan-bahan tambang antara lain: emas, Fosfat, Obsidian, Tras, Batu Gamping, Batu Pasir Kuarsa, Opal, Kaolin, Zeolith, Batu Besi, Timah Hitam, Feldspar, Batu Apung, Lempung, Bentonit Ca, Batu Gunung (Andesit- Basalt), Perak, dan Fosil Kayu. Berlimpahnya bahan baku semen (batu gamping, tanah liat, dan batu kapur) di Kecamatan Bayah, Cilograng, Panggarangan, Bojongmanik dan Muncang, memosisikan Lebak menjadi daerah yang menjanjikan bagi masuknya investor pabrik semen di masa depan. Industri batu semper atau fosil kayu (Silicified wood) bahkan telah menembus pasar di sejumlah negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sementara Zeolith yang merupakan bahan campuran pakan ternak, perikanan, atau tambak udang, bahan penurun kadar Ph tanah, bahan pengendali limbah industri, penjernih air minum, penghilang kesadahan air, dan penghilang bau/warna, belum banyak dieksploitasi meski potensinya sangat berlimpah di Kecamatan Bayah, yang mencapai lebih dari 123 juta ton.

Kabupaten Lebak mewarisi sejumlah obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata, spiritual. Dengan 13 obyek wisata marina, 27 wisata tirta, 16 obyek wisata sejarah, 1 suaka alam, serta 20 obyek wisata budaya dan lainnya, menjadikan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Sebagai contoh: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat



Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.

Kerajinan mebel dan perkakas berbahan baku bambu juga memiliki potensi ekspor yang tinggi, sebagaimana telah berkembang di daerah Pasir Ona Rangkasbitung Timur yang telah berhasil membuka pasar ekspor di Eropa dan Amerika Serikat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Infrastruktur wilayah memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur wilayah bahkan secara langsung menjadi daya tarik bagi investor dalam mengembangkan rencana bisnisnya di suatu daerah. Terkait dengan hal ini, infrastruktur wilayah dimaksud adalah mencakup beberapa bidang, yaitu: jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah dalam konteks tata ruang bahkan tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1) Jalan dan Jembatan

Jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional maupun jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strtegis kabupaten. Dibandingkan dengan daerah sekitar, Lebak memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kualitas infrastruktur jalan yang kondisinya relatif lebih baik masih diatas standar pelayanan minimal sebesar 60% yang telah ditetapkan untuk kondisi jalan baik dan sedang.



Dari sekitar 837,96 km jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak sepanjang 528,08 Km (63%) dalam kondisi baik dan sedang sedangkan sisanya 309,87 km (37%) dalam kondisi rusak. Untuk jembatan, baik jembatan beton maupun jembatan gantung masing-masing berjumlah 619 unit dengan rincian 302 unit jembatan dalam kondisi baik dan 317 unit dalam kondisi rusak sedangkan untuk jembatan gantung dari 588 unit, 237 unit diantaranya dalam kondisi baik dan 351 unit dalam kondisi rusak.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dengan inovasi yang dilakukan inilah iklim investasi menjadi lebih baik, yang terbukti dengan meningkatnya realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.23
Jumlah Investor Dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2016

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	NILAI INVESTASI				
1.1	NILAI INVESTASI PMA (US\$)	35.038.000	189.700.000	-	860.731.500
1.2	NILAI INVESTASI PMDN (Rp. Ratusan Ribu)	3.819.346.487.840	268.005.488.000	1.252.489.000.000	12.900.361.970.000
2	JUMLAH INVESTOR				
2.1	PMA	6	4	2	13
2.2	PMDN	3	929	670	9

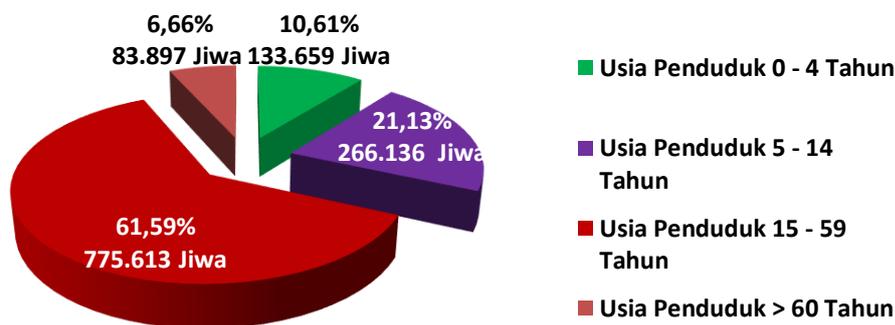
Sumber : BPMPT Kabupaten Lebak 2016

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sebagai daerah yang sedang berkembang, sumber daya manusia di Kabupaten Lebak menjadi faktor pendorong bagi tumbuhnya geliat perekonomian daerah. Struktur usia penduduk yang sebagian besar terdiri dari penduduk usia produktif (61,59%) sebagaimana tampak pada grafik 2.20, adalah modal sosial yang sangat berperan penting bagi kemajuan daerah. Demikian pula dengan tingkat pendidikan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.



Grafik 2.19
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2016

Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2016 terhadap capaian 6 (enam) misi RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut.

TABEL 2.24
REKAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2016

Misi	Tujuan	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 (%)		
				≥ 100	80 - 99%	≤ 79
2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata	20	14	6	0
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	27	16	9	2
	2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK & kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	11	8	2	1
		4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	3	3	0	0
		5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	2	1	0	1
		6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	2	2	0	0



Misi	Tujuan	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 (%)		
				≥ 100	80 - 99%	≤ 79
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19	13	5	1
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;	13	6	2	5
		9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;	13	11	2	0
		10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;	2	2		
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur;	11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.	2	2		
		12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;	2	2		
		13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	3	3		
		14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;	4	4		
		15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman	1	1		
		16. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	5	4		1
		17. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1	1		
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	18. Meningkatnya rehabilitasi lahan	1	1		



Misi	Tujuan	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 (%)		
				≥ 100	80 - 99%	≤ 79
		19. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	3	3		
		20. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;	2	1	1	
		21. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	1	1		
		22. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;	1	1		
	8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggula-ngan bencana	23. Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan penanggula-ngan bencana	3	1		2
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	24. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	3	3		
		25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat	4	4		
Jumlah			148	108	27	13



Hasil evaluasi pelaksanaan program APBD terhadap RKPD 2016 dapat dilihat dari pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pada setiap misi sebagai berikut :

- Misi Pertama**, Meningkatnya Kualitas sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif. Pada misi ini didukung oleh 2 tujuan dan 6 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 1					
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata					
<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :</i>					
1	Bidang Pendidikan				
1	Angka Melek Huruf	Persen	98,40	96,68	98,25
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,90	5,86	99,32
3	Angka Partisipasi Kasar :				
	- PAUD	Persen	28,00	38,44	137,29
	- SLTP	Persen	98,97	105,65	106,75
	- SLTA	Persen	61,50	71,41	116,11
4	Angka Partisipasi Murni :				
	- SD	Persen	98,88	98,88	100,00
	- SLTP	Persen	85,90	87,09	101,39
	- SLTA		53,24	54,04	101,50
	Angka Partisipasi Sekolah :				
	- SD	Persen	99,89	100,52	100,63
	- SLTP	Persen	93,50	89,82	96,06
	- SLTA	Persen	48,25	66,75	138,34
	Angka Putus Sekolah (Aps):				
	- SD	Persen	0,26	0,12	216,67
	- SLTP	Persen	0,20	0,25	80,00
	- SLTA	Persen	0,54	0,23	234,78
	Angka Kelulusan :				
	- SD	Persen	97,13	99,65	102,59
	- SLTP	Persen	93,62	95,89	102,42
	- SLTA	Persen	98,73	95,47	96,70
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	94,63	101,00	106,73
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	86,77	70,98	81,80
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	84,85	87,49	103,11



Sasaran 2 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 2					
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata					
1	Bidang Kesehatan				
1	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	178,00	162,10	109,81
2	Angka Kematian Bayi	/ 1.000 KH	22,00	17,30	127,17
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,46	63,46	100,00
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,59	0,14	421,43
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	77,00	71,00	92,21
6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	70,00	78,00	111,43
7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular :	Persen	66,00	67,00	101,52
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	74,00	72,10	97,43
11	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Persen	88,85	72,00	81,04
12	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	81,03	61,52	75,92
13	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100,00	100,00	100,00
14	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita	Persen	40,00	41,43	103,58
15	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00
16	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00
16	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Persen	100,00	100,00	100,00
17	Kepuasan pelayanan RSUD	Persen	78,00	77,29	99,09
18	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	Persen	1,40	0,70	200,00
19	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	Persen	85,00	92,69	109,05
2	Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera				
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Persen	9,53	9,80	102,83
2	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	Persen	66,00	64,22	97,30
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) 5%	Persen	11,09	10,69	96,39
4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	Persen	55,00	29,85	54,27
5	Jumlah kelompok bina keluarga :				
	- Bina Keluarga Balita (BKB)	Kelompok	375	330,00	88,00
	- Bina Keluarga Remaja (BKR)	Kelompok	205	186,00	90,73



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	- Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kelompok	255	207,00	81,18

- Tujuan 2** : Membangun sumberdaya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya
- Sasaran 3** : Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 3 Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia					
1	Bidang Tenaga Kerja				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,00	8,50	94,44
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	32	32,00	100,00
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	192	240,00	125,00
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	300	550,00	183,33
2	Bidang Transmigrasi				
	Jumlah transmigrasi Umum	Orang	40	5	13
3	Bidang Sosial				
1	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	35,00	36,00	102,86
2	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok	15,00	15,00	100,00
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	41,00	42,50	103,66
4	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	35,35	37,20	105,23
5	Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera	Orang	3.559	3.559	100,00
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	63,96	63	98,50

- Sasaran 4** : Meningkatkan peran pemuda dan olahraga

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 4 Meningkatnya peran pemuda dan olahraga					
1	Bidang pemuda dan Olahraga				
1	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan	Pemuda	140	193	137,86



2	Jumlah penyelenggaraan event olah raga	Event/Tahun	2	2	100,00
3	Pembinaan atlet berprestasi	Atlet	60	60	100,00

Sasaran 5 : Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 5 Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal					
1	Bidang Kebudayaan				
1	Jumlah event seni dan budaya	Event/Tahun	10	11	110,00
2	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	Persen	100	40	40,00

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan					
1	Bidang Perpustakaan				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	13.622	13888	101,95
2	Jumlah perpustakaan milik daerah	Unit	1	1	100,00

2. **Misi Kedua**, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berorientasi Pelayanan Publik. Misi ini didukung oleh 1 tujuan dan 1 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Sasaran 7 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 7 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
1	Perencanaan				
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	100
2	Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	3	3	100
3	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	91,00	92,55	102
2	Komunikasi dan Informatika				
1	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Aplikasi	1	1	100
3	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi	Media Informasi/ Tahun	12	13	108
3	Keuangan				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Opini audit BPK		WTP	WTP*	100
2	Rasio Kemandirian Daerah	Persen	20,29	17,72	87
4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan	Orang	958	1.084	113
2	Jumlah aparatur yang terbina	Orang	11.395	10.880	95,48
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan	Orang	225	403	179
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	91,00	83,29	91,53
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	89,00	94,82	106,54
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	47,00	46,12	98,13
4	Ketersediaan database kependudukan	Persen	96,00	94,15	98,07
7	Statistik				
1	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah	Dokumen	<u>3</u>	4	<u>133,33</u>
8	Persandian				
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Website	1	<u>1</u>	<u>100,00</u>
9	Fungsi Penunjang Lainnya				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala (1-4)	3	3	100,00
2	Peningkatan Level APIP	Level	Level 2	Level 1	50,00
3	Tertatanya aset daerah	Persen	30	30	100
4	Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata	Unit	4	<u>8</u>	200,00

3. **Misi Ketiga**, Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dalam ketercapaian misi ini didukung oleh 1 tujuan dan 4 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 8					
Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi					
1	Penanaman Modal				
1	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional	Trilyun	11,57	11,50	99,39
2	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :				
	- PMDN	Perusahaan	3	2	66,67
	- PMA	Perusahaan	1	3	300,00
3	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	60	47	78,33



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
1	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	731	736	100,68
2	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah		-	-	
	- Usaha mikro	Unit	49.636	48.906	98,53
	- Usaha kecil	Unit	845	623	73,73
	- Usaha menengah	Unit	15	9	60,00
3	Perdagangan				
1	Tertatanya pasar tradisional dan meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Unit	3	2	66,67
4	Perindustrian				
1	Jenis dan jumlah industri menengah :				
	- Jenis industri	Jenis	22	22	100
	- Jumlah industri	Unit	33	33	100
2	Jenis dan jumlah industri kecil :				
	- Jenis industri	Jenis	22	22	100
	- Jumlah industri	Unit	16.334	16344	100

Sasaran 9 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 9					
Meningkatnya ketahanan pangan daerah					
1	Pangan				
1	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok				
	- Padi	Ton GKP	572.361,47	698.463	122,03
	- Palawija	Ton	33.886,49	37.697	111,24
	- Hortikultura	Ton	176.911,86	196.071	110,83
2	Pertanian				
1	Daerah Rawan pangan	Kecamatan	3	3	100,00
2	Sentra Kawasan Unggulan	Lokasi	2	2	100,00
3	Produksi daging	Kg	8.405.539	8.405.616	100,00
4	Cakupan Bina Kelompok Tani				
	- Pemula	Kelompok	1.480	1541	104,12
	- Lanjut	Kelompok	842	801	95,13
	- Madya	Kelompok	93	92	98,92
	- Utama	Kelompok	2	4	200,00
2	Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi ikan budidaya	Ton	3.564,00	3.566	100,04
2	Produksi ikan tangkap	Ton	5.453,87	5.509,82	101,03
3	Konsumsi ikan	kg Per kapita	16,45	17,04	103,59



Sasaran 10 : Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 10					
Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan					
1	Bidang Kehutanan dan Perkebunan				
1	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)	Kg	37.361,88	37.745,24	101,03
2	Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)	Ton	31.901,73	31960,28	100,18

Sasaran 11 : Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 11					
Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah					
1	Pariwisata				
1	Jumlah dan jenis obyek wisata	Lokasi (ODTW)	16	16	100,00
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	350.000	352.576	100,74

4. **Misi Keempat**, Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas. Ketercapaian misi keempat didukung oleh 2 tujuan dan 7 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan 5 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Sasaran 12 : Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 12					
Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan					
1	Pekerjaan Umum				
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	60,27	63,02	104,56
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	Persen	98,85	101,53	102,71



Sasaran 13 : Meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 13					
Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat					
1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Persen	67,00	67	100,00
2	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	Lokasi	3	4	133,33
3	Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)	Unit	2	2	100,00

Sasaran 14 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 14					
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat					
1	Terbangunnya jalan perdesaan	Km	120,00	173,18	144,32
2	Persentase cakupan air bersih	Persen	60,72	83,07	136,81
3	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	61,50	62,1	100,98
4	Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan	Unit	2	2	100,00

Sasaran 15 : Meningkatkan kualitas perumahan permukiman

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 15					
Meningkatnya kualitas perumahan permukiman					
1	Bidang Perumahan				
1	Tertatanya rumah sehat dan layak huni	Unit	100	113	113,00

Tujuan 6 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi

Sasaran 16 : Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 16					
Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ					
1	Bidang Perhubungan				
1	Jumlah Jenis Rambu Terpasang :				
	- Rambu-rambu	Unit	80	51	63,75
	- Lampu Lalu Lintas	Unit Warning	4	4	100



		Light			
	- Marka	M ²	500	740	148
2	Pemasangan PJU	Titik	110	276	251
3	Pemeliharaan PJU	Titik	640	660	103

Sasaran 17 : Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 17 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan					
1	Bidang Perhubungan				
1	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara	Unit	1		0

5. **Misi Kelima**, Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan. Misi ini didukung oleh 2 tujuan dan 6 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan 7 : Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran 18 : Meningkatkan rehabilitasi lahan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 18 Meningkatnya rehabilitasi lahan					
1	Kehutanan				
1	Rehabilitasi lahan kritis	Ha	400	400	100,00

Sasaran 19 : Meningkatkan fungsi daerah tangkapan air

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 19 Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air					
1	Bidang Lingkungan Hidup				
1	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar :				
	- Mata Air	Unit	10	10	100
	- Bendungan	Unit	2	2	100
	- Sempadan Sungai	Km	2	2	100



Sasaran 20 : Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 20					
Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas					
1	Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah	Persen	100	80	80
2	Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	Perusahaan	10	12	120

Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 21					
Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah					
1	Persentase pengurangan sampah	Persen	30,00	32,49	108

Sasaran 22 : Pengendalian dan pemanfaatan ruang

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 22					
Pengendalian dan pemanfaatan ruang					
1	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	Persen	40	<u>40</u>	<u>100,00</u>

Tujuan 8 : Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
Sasaran 23 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 23					
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana					
1	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	84	60	71,43
2	Cakupan penanggulangan korban bencana	Persen	100	100	100,00
3	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)	Kali	13	7	53,85



6. **Misi Keenam**, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. Ketercapaian misi keenam didukung oleh 1 tujuan dan 2 sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 9 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah

Sasaran 24 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 24 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					
1	Tingkat penegakan perda	Persen	90	92	102,22
2	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Kegiatan	8	14	175,00
3	Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persen	83,00	83	100,00

Sasaran 25 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Sasaran 25 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat					
1	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)	Kegiatan	2	2	100,00
2	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	Kegiatan/Tahun	4	4	100,00
3	Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan (MDTA)	Ruang Kelas	25	25	100,00
4	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ormas	100	100	100,00





Tabel 2.25
Rekap Alasan Ketidaktercapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016			alasan ketidaktercapaian	SKPD Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Sasaran 2							
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata							
1	Bidang Kesehatan						
1	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	81,03	61,52	75,92	Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk memberikan pelayanan kesehatan anaknya setelah umur 2 tahun keatas.	Dinkes
2	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	Persen	55,00	29,85	54,27	Kebutuhan PLKB/PKB sebanyak 173 orang. Pada Tahun 2016 PLKB/PKB tersedia sebanyak 56 Orang, sehingga masih kekurangan Sebanyak 117 orang. Kekurangan tersebut dipenuhi melalui rekrutmen pada tahun 2017 sebanyak 56 Orang, sisa kekurangan petugas 61 akan dipenuhi tahun 2018.	DP2KBP3A
Sasaran 3							
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia							
2	Bidang Transmigrasi						



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016			alasan ketidaktercapaian	SKPD Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
	Jumlah transmigrasi Umum	Orang	40	5	13	Upaya persiapan, sosialisasi sudah dilaksanakan, akan tetapi jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat terbatas.	Disnakertrans
Sasaran 5							
Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal							
1	Bidang Kebudayaan						
2	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	Persen	100	40	40,00	pengguna/pemakai cagar budaya berinisiatif untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri.	Dinas Pendidikan
Sasaran 7							
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah							
1	Fungsi Penunjang Lainnya						
1	Peningkatan Level APIP	Level	Level 2	Level 1	50,00	Masih adanya elemen penilaian yang belum dapat terpenuhi untuk mencapai level 2, diantaranya kurangnya SDM Auditor (Ideal 50 Orng, yang ada 23 orang)	Inspektorat Daerah
Sasaran 8							
Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi							
1	Penanaman Modal						
1	PMDN	Perusahaan	3	2	66,67	Perusahaan masih dalam tahap pembangunan	DPMPPT



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016			alasan ketidaktercapaian	SKPD Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
2	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	60	47	78,33	Sebagian perusahaan belum merealisasikan investasinya (Berdasarkan LKPM yang disampaikan oleh perusahaan)	DPMPPT
2	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
	- Usaha kecil	Unit	845	623	73,73		Dinkop
	- Usaha menengah	Unit	15	9	60,00		Dinkop
3	Perdagangan						
1	Tertatanya pasar tradisional dan meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Unit	3	2	66,67	Adanya perubahan spesifikasi dan pergeseran volume pembangunan pasar, disebabkan penyesuaian terhadap juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu pada saat pelaksanaan yang hanya tersedia waktu selama 3 bulan tidak mencukupi karena di daerah Cipanas terjadi curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan.	Disperindag
Sasaran 16							
Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ							
1	Bidang Perhubungan						
1	Jumlah Jenis Rambu Terpasang :						Dishub



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN 2016			alasan ketidaktercapaian	SKPD Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
	- Rambu-rambu	Unit	80	51	63,75	alokasi anggaran pada tahun 2016 diprioritaskan untuk penyediaan <i>water Barrier</i> dan <i>Traffic cone</i> untuk penanganan lalulintas perkotaan. Kekurangan realiasi target tahun 2016 dipenuhi di tahun 2017	
Sasaran 24							
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana							
1	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	84	60	71,43	Rentang Kendali terkendala oleh daya jangkau/ geografis dan Sarpras yang belum memadai	Satpol PP
2	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)	Kali	13	7	53,85	Rentang Kendali terkendala oleh daya jangkau/ geografis dan Sarpras yang belum memadai	Satpol PP



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Beberapa permasalahan yang bersifat strategis dan perlu penanganan :

1. Terbatasnya sumberdaya aparatur di beberapa SKPD yang berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya arus distribusi barang dan manusia terutama pada ruas jalan strategis penghubung antara lebak utara, lebak tengah dan lebak selatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
3. Belum adanya regulasi yang lebih spesifik terkait dengan pemanfaatan lahan, terutama lahan pertanian berkelanjutan, yang berakibat pada rendahnya daya tahan keberlanjutan pembangunan pertanian, dimana pertanian merupakan sektor utama lapangan kerja masyarakat kabupaten Lebak.



4. Sebaran penduduk kabupaten yang cukup merata pada wilayah kabupaten Lebak yang luas, cukup menyulitkan dalam memberikan layanan publik, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dapat dilihat dengan masih rendahnya APK SMA/Sederajat dan masih adanya penduduk yang berjarak lebih dari 5 Km dari tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas maupun Pustu.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Secara alamiah, permasalahan pembangunan daerah dikonstruksi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Permasalahan internal bersumber pada adanya sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumberdaya pembangunan daerah sehingga menyebabkan tidak optimalnya kinerja pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya berbagai potensi ancaman yang tidak terantisipasi sehingga kemudian bermanifes sebagai masalah dalam kehidupan sosial. Berangkat dari pemahaman inilah maka identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak akan dirumuskan, yang pada satu sisi berfokus pada pemerintah daerah beserta segenap instrumentasinya, dan di sisi lain menelaah berbagai hal dengan pendekatan sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasi urusan pemerintahan wajib menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan penunjang. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain tersaji dalam tabel 2.26 berikut ini:



Tabel 2.26
Permasalahan Daerah Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
I.	Urusan Wajib	
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya layanan pendidikan anak usia dini;2. Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;4. Masih adanya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah;5. Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi dan distribusi yang belum merata;7. Belum optimalnya layanan pendidikan Non Formal;8. Sistem informasi manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan baik; dan9. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.10. Masih terbatasnya sanitary dan Tempat sampah di sekolah-sekolah;11. Belum optimalnya pemetaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah.
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Perilaku masyarakat di bidang kesehatan masih rendah; Kondisi kesehatan lingkungan masih rendah;2. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan Terbatasnya tenaga kesehatan.4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya zat besi, sehingga perlu diadakan penyuluhan tentang konsumsi makanan zat besi terhadap remaja puteri dan wanita subur serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), untuk mengurangi penyakit Anemia.
3.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Ketersediaan jalan yang menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan;2. Tingginya tingkat kerusakan jalan;3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; dan4. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan jasa alat berat.5. Tingginya kerusakan jaringan irigasi6. kurangnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi.7. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses air bersih;8. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses infrastruktur sanitasi; dan9. Masih rendahnya PSU permukiman.10. Banyaknya fasos dan fasum yang belum tertata dan terpelihara; dan11. Banyaknya gedung pemerintah dalam kondisi rusak.



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	
4.	Perumahan		Rendahnya kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah
5.	Penataan Ruang	1. 2.	Kurangnya Ketaatan Terhadap RTRW; dan Kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang.
6.	Perencanaan Pembangunan	1. 2.	Sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan daerah belum optimal; Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Perencanaan.
7.	Perhubungan	1. 2.	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan; dan Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.
8.	Lingkungan Hidup	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Kurang tersedianya pos jaga hutan, Batas zonasi TNHGS yang belum sinkron antara Kemeterian Kehutanan dengan Masyarakat yang termasuk dalam areal perluasan TNGHS Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau di areal perkotaan; Terbatasnya ruang terbuka bagi publik; Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup; Rendahnya ketaatan para pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; Adanya persaingan pemanfaatan air untuk irigasi dan penggunaan air untuk sektor lain; Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan / mitigasi bencana; Kurangnya Sarpras dan SDM bidang Penanggulangan Bencana; dan Banyaknya daerah rawan bencana.
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	1. 2.	Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian perkembangan kependudukan; dan Kurangnya Pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
10.	Pemberdayaan Perempuan	1. 2. 3. 4.	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi; dan Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah. Perlu dana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada KDRT maupun Visum korban kekerasan anak.
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. 2. 3. 4.	Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi; Rendahnya Tingkat partisipasi KB pria; Kurangnya Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB); Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		<ol style="list-style-type: none">5. Rendahnya tingkat kepesertaan KB dari pasangan usia subur;6. Belum optimalnya Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan7. Perlunya Koordinator KB di Kecamatan;8. Kurangnya sarana penunjang Gerakan Sayang Ibu (GSI).
12.	Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Banyaknya orang terlantar, Anak jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak kekerasan, korban Trafficking, korban penyalahgunaan Napza dan perlunya rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).3. Perlunya penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS.
13.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya kualitas/SDM para pencari kerja (penganggur) dan peluang kerja; dan2. Banyaknya kasus PHK dan kasus ketenagakerjaan lainnya.3. Sedikitnya lowongan dan peluang kerja bagi pencari kerja/Penganggur4. Banyaknya penyalahgunaan prosedur, perekrutan dan Penempatan TKI ke Luar Negeri.5. Banyaknya Pelaksanaan Penempatan TKI Ilegal.6. Banyaknya Pekerja / Buruh belum menjadi anggota Jamsostek7. Banyaknya kecelakaan kerja
14.	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;2. Masih terbatasnya akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; dan3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM.4. Terbatasnya akses KUMKM terhadap lembaga pembiayaan5. Rendahnya produktifitas , daya saing dan peluang pasar KUMKM;6. Belum optimalnya peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga infrastruktur ekonomi alternatif di perdesaan.
15.	Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Belum Optimalnya promosi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan investasi;2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/stakeholders tentang regulasi investasi dan penanaman modal;3. Pengelolaan pelayanan investasi dan penanaman modal belum memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara optimal.4. Masih memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemenuhan data yang diminta oleh



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	
		5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	dinas/instansi/stakeholder Jaminan keamanan keberadaan database penerbitan perijinan masih minim (rawan) Masih adanya beberapa perusahaan yang belum melaporkan kegiatan usahanya secara rutin kepada dinas/instansi Masih memakan waktu cukup lama dalam proses pemenuhan data-data perusahaan yang dibutuhkan oleh dinas/instansi/stakeholder SDM staf masih kurang dan belum memadai Masih sulit mengakses form pengaduan, dan lain-lain pada website Masih kurangnya informasi cara penyampaian pengaduan (kotak pengaduan, website, SMS, Telp/Faxsimile, ataupun Surat) kepada masyarakat Pemenuhan pelayanan masih belum prima Pelayanan perijinan dan non perijinan masih ada yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait Layanan perijinan dan non perijinan belum optimal dan masih tingginya tingkat interaksi dalam proses pelayanan Terbatasnya sumber daya manusia pelayanan perijinan dan non perijinan Sarana dan prasarana belum memadai
16.	Kebudayaan	1. 2. 3. 4. 5.	Belum terdatanya potensi seni dan budaya masyarakat; Belum optimalnya penerapan budaya dan kearifan lokal; Belum optimalnya fungsi kawasan budaya dan pelaku budaya; dan Kurangnya fasilitas kesenian Kurangnya fasilitas akses jalan menuju tempata cagar budaya situs makam Patihderus.
17.	Pemuda dan Olahraga	1. 2. 3.	Terbatasnya sarana dan prasana untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; dan Terbatasnya sarana dan pembinaan olah raga.
18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. 2. 3.	Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah; Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan Masih rendahnya pemahaman tentang aliran/ajaran agama yang sudah ditetapkan / disahkan.
19.	Pemerintahan Umum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual yang jelas terkait prosedur pelayanan di setiap SKPD; Pengawasan Internal dan Pengendalian yang berkelanjutan belum optimal; Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi; Belum optimalnya penataan aset-aset daerah; Belum semua pelayanan publik sesuai harapan masyarakat;



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		7. Masih rendahnya kapasitas, profesionalisme dan jumlah sumber daya manusia aparatur; dan 8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.
20.	Kepegawaian	1. Pada beberapa SKPD jumlah aparatur masih kurang.
21.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	1. Permasalahan utama adalah masih rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintah desa
22.	Kearsipan	1. Permasalahan utama adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan.
23.	Komunikasi dan Informasi	1. Sebaran Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika belum optimal
24.	Pertanian	1. Rendahnya kualitas SDM kelompok tani; 2. Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani; 3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani; 4. Sempitnya penguasaan lahan milik petani; 5. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi pengolahan produk pertanian; 6. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian; 7. Terbatasnya ketersediaan alat pasca panen Pertanian; 8. Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan Potensial belum di kelola secara optimal; 9. Terjadinya serangan (OPT) Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian dan Perkebunan pada setiap musim. 10. Terjadinya bencana alam (bencana banjir dan kekeringan) pada lahan pertanian. 11. Sebagian besar lahan persawahan adalah lahan tadah hujan. 12. Terbatasnya Tenaga penyuluh pertanian lapangan idealnya 1 desa oleh 1 orang penyuluh. 13. Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak dengan skala usaha terbatas dan belum menjadi usaha pokok; 14. Terbatasnya bibit ternak baik kualitas dan kuantitas; 15. Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi dan informasi peternakan 16. Penyakit Hewan menular masih menjadi Ancaman; 17. Masih terdapat pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai; 18. Panjangnya sistem tata Niaga Produk Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; dan 19. Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan. 20. Terjadinya alih fungsi lahan penggembalaan 21. Pemanfaatan hijauan pakan ternak selain rumput masih rendah 22. Lokasi ternak yang tersebar dalam lokasi yang luas dan unit terkecil dan belum terkonsentrasi dalam kawasan 23. Struktur populasi ternak yang tidak sebanding rasio antara jantan dan betina 24. Angka kelahiran ternak yang masih rendah 25. Masih rendahnya tingkat kepemilikan ternak oleh



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	
			masyarakat
25.	Pariwisata	1.	Belum optimalnya pengelolaan objek wisata potensial baik dari pengaturan regulasi, promosi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
26.	Kelautan dan Perikanan	1.	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM nelayan;
		2.	Rendahnya produktivitas usaha perikanan;
		3.	Masih rendahnya sistem alih teknologi pengolahan produk hasil perikanan;
		4.	Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar pembudidaya, nelayan dan pengolahan ikan;
		5.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan selain perikanan; dan
		6.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi ikan budidaya dan tangkap.
		7.	Balai Benih Ikan (BBI) Kab. Lebak belum mendapatkan sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) sehingga Benih Yang dihasilkan belum bersertifikat.
		8.	Potensi lahan budidaya yang dimiliki kab.lebak cukup luas tapi lahan yang baru dikembangkan baru sedikit
		9.	SDM pembudidaya dan pembenihan masih banyak belum terampil dalam teknologi budidaya
27.	Perdagangan	1.	Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan; dan
		2.	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian barang beredar dari alur distribusi dan konsumsi.
28.	Perindustrian	1.	Produktivitas IKM masih rendah;
		2.	Skala usaha masih cenderung perorangan
29.	Transmigrasi	1.	calon transmigran belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan
30.	Ketahanan Pangan	1.	Panjangnya rantai distribusi pangan masyarakat sehingga mempengaruhi harga produksi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
		2.	Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya, selain lembaga distribusi pangan masyarakat belum efektif juga masih tingginya permainan harga oleh para tengkulak
		3.	Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada bab ini dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Lebak serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan RPJMD Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Selain itu, Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, yang digunakan sebagai gambaran umum untuk menilai situasi karakteristik perekonomian Kabupaten Lebak pada Tahun 2016, serta prospek perekonomian pada tahun 2017-2018.

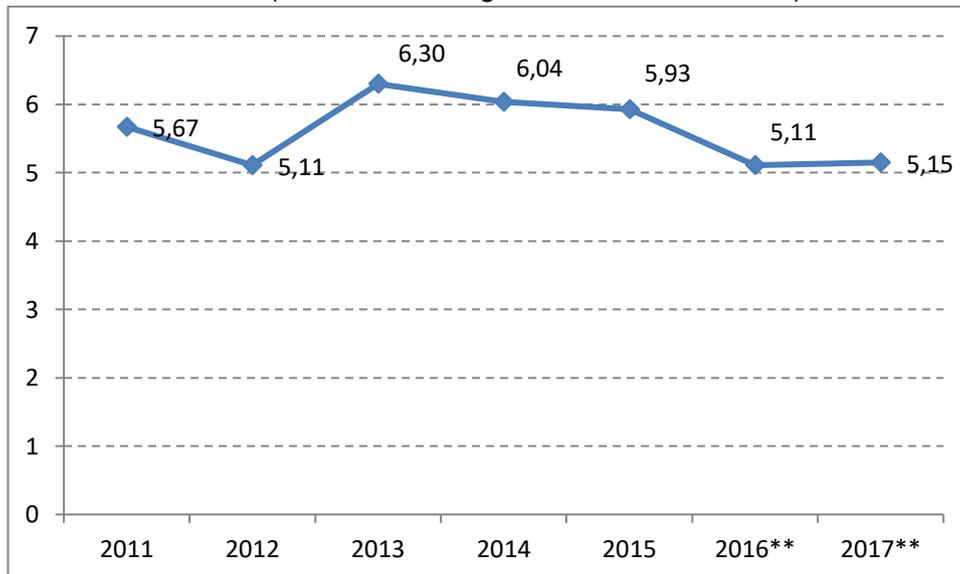
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2011-2015 cenderung fluktuatif. Secara rerata pertumbuhan ekonomi masih diatas 5%. Tahun 2014 ekonomi daerah pertumbuhannya masih diatas 5% namun demikian lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utama penyebab lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan November Tahun 2014. Kenaikan harga tersebut menjadi beban pada biaya distribusi sehingga menyebabkan naiknya beberapa Komoditas bahan pokok masyarakat. Kenaikan harga BBM merupakan dampak langsung dari kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi subsidi BBM.

Pemerintah berasumsi pengurangan subsidi BBM tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan belanja infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi agar mampu tumbuh lebih tinggi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2011-2017 secara lebgkap dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2011-2017
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)



Sumber :BPS Kab. Lebak, 2015

**) Angka Proyeksi

Beberapa fenomena ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak antara lain terjadinya pertumbuhan pada sektor pertanian yang merupakan sektor utama penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lebak pada tahun 2015. Selain itu pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga tetap tumbuh dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,15. Laju Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 diproyeksikan lebih besar dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi didorong oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatnya APBDes pada tahun 2017 seiring meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat dan bertambahnya dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggerakkan sector riil di masyarakat. Salah satu caranya melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat

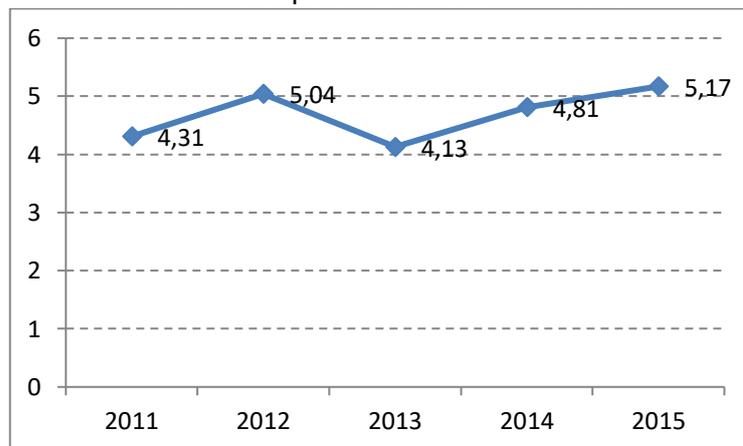
swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi desa melalui Bumdes . Dampak dari pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat meningkatkan akses barang dan jasa dari pusat-pusat produksi masyarakat kepada pasar, ataupun sebaliknya dapat lebih luas dan lebih mudah serta pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan.

- b. Peningkatan aksesibilitas jalan strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.
- c. Meningkatnya pertumbuhan sector industry pengolahan dengan penopang utamanya yaitu produksi semen yang lebih besar.
- d. Sektor bangunan yang terus tumbuh dengan baik, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah permukiman sebagaimana Rencana tata ruang wilayah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Hal ini dikarenakan hampir 60% penduduk kabupaten lebak bekerja pada sektor ini. Dengan kebijakan ini diharapkan Kabupaten Lebak tetap menjadi lumbung pangan nasional. Selain itu Kabupaten Lebak juga terus mengembangkan beberapa komoditas yang diproyeksikan mampu bersaing dan menjadi komoditas unggulan, seperti Pisang, Ikan Air Tawar, Aren, Bambu dan Kerbau. Komoditas tersebut dijual bukan hanya dalam bentuk bahan mentah, juga dalam bentuk hasil pengolahan supaya memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

Tingkat inflasi Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut tingkat inflasi berkisar pada 4,31 - 5,17. Inflasi di Kabupaten Lebak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya peningkatan biaya distribusi yang diakibatkan kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditi kebutuhan masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Lebak pada tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



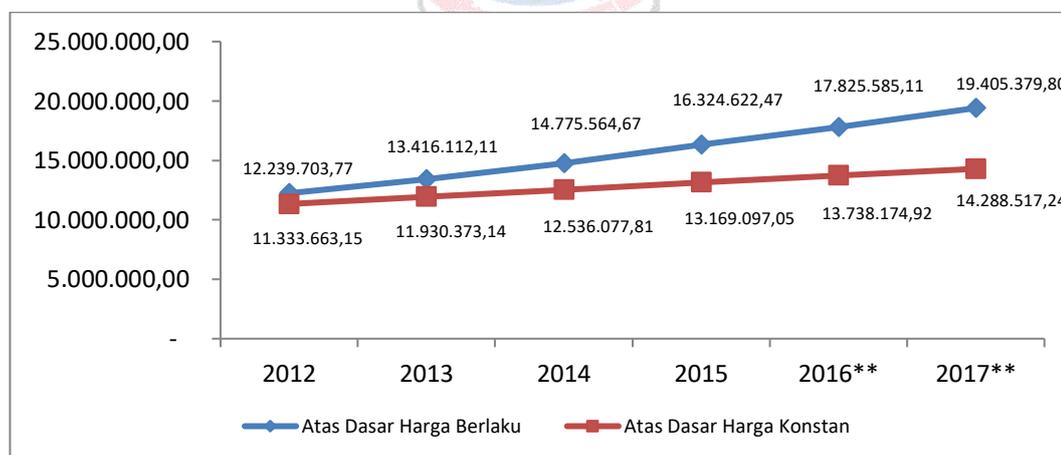
Grafik 3.2
Inflasi Kabupaten Lebak 2011 – 2015



Sumber : BPS Kab. Lebak

Selanjutnya, tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut bertambah baik.

Grafik 3.3
PDRB Per kapita Kabupaten Lebak Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Kabupaten Lebak

***) Angka Proyeksi

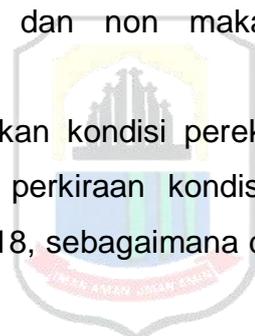
Grafik 3.3 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2012-2017. Tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku

mencapai Rp. 14,775,564.67 dan pada tahun 2017 diperkirakan mampu mencapai pada kisaran Rp. 19,405,379.80. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dari Rp. 12,536,077.81 pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp. 14,288,517.24.

Meskipun PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup baik, kita pun menyadari bahwa pertumbuhan PDRB perkapita yang terjadi belum mampu menekan persentase angka kemiskinan sampai dengan 9%. Namun demikian persentase angka kemiskinan kita yang mencapai 9,97% sudah termasuk melebihi target MDG's yang mencanangkan batas maksimal kemiskinan sebesar 10%.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan non makan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Lebak pada Tahun 2017, maka perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini .



Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2018

No.	Indikator Makro	2018
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp.	19.437.509
2.	PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta)	27.630.716
3.	PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2010)	14.863.732,52
4.	PDRB per Kapita (adh. Berlaku)	21.129.022,83
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,17
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,53
7.	Prosentase Penduduk Miskin	9,00
8.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,86

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional.

Berdasarkan RKP 2018, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018, maka dilakukan :

- Memperbaiki Kualitas Belanja.
- Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
- Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Pada tahun 2018 diharapkan kualitas infrastruktur penghubung (jalan maupun jembatan) antar wilayah di Kabupaten Lebak semakin baik, dengan demikian diharapkan arus manusia dan distribusi barang semakin cepat dan mengurangi beban biaya produksi. Dengan tersedianya prasarana infrastruktur yang berkualitas tersebut diharapkan perekonomian masyarakat yang bersifat *home industry* mempunyai kemudahan dalam memasarkan produknya.

Selain infrastruktur, dalam upaya peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, maka pelayanan perijinan semakin dipermudah dengan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) serta semakin dekat dengan lokasi masyarakat yaitu Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pasar bebas bagi asia tenggara, mendorong kita untuk terus meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan produktivitas barang dan jasa berdasarkan potensi lokal melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat setempat, serta mempersiapkan pasar maupun konsumen sebagai jaminan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Adapun karakteristik komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu :

- Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian
- Mempunyai Keterkaitan dengan masyarakat
- Mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lainnya baik dalam harga produk, biaya produksi dan pelayanan
- Memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya baik dalam hal pasar konsumen maupun pemasok bahan baku
- Memiliki status teknologi yang terus meningkat, melalui inovasi teknologi
- Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya
- Dapat bertahan dalam jangka panjang
- Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal
- Mendapat dukungan keamanan, sosial, budaya, dan kelembagaan
- Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

Ditingkat regional tentu saja Kabupaten Lebak sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten menempatkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang termasuk peringkat 2 terbawah. Dengan demikian segala upaya harus terus dilakukan terutama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah; meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten harus senantiasa mengalami peningkatan melalui Koordinasi yang lebih terarah dan terukur, sebagai upaya menempatkan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Sehingga Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan sinergi mampu menjadi daya ungkit yang optimal bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak yang saat ini baru mencapai 62,03 (Tahun 2015).

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, serta Privat

sektor dan masyarakat, diharapkan pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Lebak diperkirakan tumbuh sebesar minimal 5%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, perlu diingat bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pengelolaan pajak bagi Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sedangkan untuk Retribusi Daerah, bila mengacu pada peraturan tersebut di atas, jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk diperluas sesuai dengan peraturan dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengenakan retribusi terhadap 8 jenis Retribusi Jasa Umum, 7 jenis Retribusi Jasa Usaha, dan 4 jenis Retribusi Perijinan Tertentu.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) merupakan hak penerimaan Daerah yang diakui sebagai penerimaan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 2) Dana Perimbangan yang terdiri atas : Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. Dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Prov/ kab/ kota/ lainnya, Lain-lain Penerimaan.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2018 mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Optimalisasi SDM Pengelola Pendapatan Daerah terutama yang terdapat UPTD yang mengelola pendapatan di tiga wilayah (Lebak Utara, Lebak Tengah dan Lebak Selatan);
2. Pemantapan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah,

dan kemampuan masyarakat (tidak membebani pertumbuhan dunia usaha) dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui skema kerjasama "*Public-Private Partnership*" maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Lebak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018 (P-RPJMD)	Proyeksi Tahun 2018 (RKPD)
1	PENDAPATAN	2,237.374.128.692	2.432.689.731.115	2.206.292.883.390	2.306.626.082.447	2.355.544.842.287
1.1	Pendapatan asli daerah	301.306.361.051	264.865.750.179	314.978.540.100	330.928.961.040	328.307.937.880
	a. Pajak daerah	56.180.591.358	47.477.100.100	57.216.519.000	61.340.000.000	61.363.100.000
	b. Retribusi daerah	162.874.967.012	13.023.319.540	13.012.021.100	15.338.961.040	12.694.837.880
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.671.126.989	1.763.830.639	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.579.675.692	202.601.500.000	241.750.000.000	251.250.000.000	251.250.000.000
1.2	Dana perimbangan	1.321.281.755.154	1.847.483.360.320	1.556.097.837.790	1.614.285.465.357	1.592.918.958.857
	a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	46.384.875.154	58.749.230.000	59.256.000.000	59.356.000.000	59.356.000.000
	b. Dana alokasi umum	1.029.228.685.000	1.100.336.786.000	1.116.841.837.790	1.133.594.465.357	1.133.594.465.357
	c. Dana alokasi khusus	149.696.070.000	688.397.334.320	380.000.000.000	421.335.000.000	399.968.493.500
	d. Alokasi Dana Desa	95.972.125.000	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	614.786.012.487	320.340.620.616	335.216.505.500	361.411.656.050	471.411.656.050
	a. Pendapatan Hibah	5.507.360.000	-	-	-	-
	b. Dana Darurat	-	-	-	-	-
	c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.308.670.987	71.008.726.616	90.315.000.000	90.820.000.000	90.820.000.000
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	343.113.705.000	249.331.894.000	244.901.505.500	270.591.656.050	270.591.656.050
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	169.876.276.500	-	-	-	110.000.000.000
	f. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu 2015-2018 terjadi dinamika. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu tahun 2015-2018 sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan dari pusat terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana semakin besar juga tambahan alokasi dana desa. Selain itu kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2018 pendapatan daerah Kabupaten Lebak dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Dengan keterbatasan anggaran yang terjadi setiap tahun, maka diharapkan belanja daerah yang disusun bersifat holistik, tematik, integrative dan spasial. Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk:

1. Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Angka melek huruf.
4. Meningkatkan aksesibilitas perekonomian yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

5. Meminimalisir dampak bencana alam melalui penanganan yang bersifat preventif maupun kuratif.
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan kewirausahaan pada sektoriil.

Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien melalui :

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
3. Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2017.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
5. Pengalokasian kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;

- d. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak mewujudkan Lebak Sehat, Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera;
6. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat, serta belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Berdasarkan kebijakan tersebut proporsi belanja daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah(Rp)				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018 (P-RPJMD)	Proyeksi Tahun 2018 (RKPD)
2.	BELANJA	1.924.710.579.092	2.449.589.146.735	2.237.935.344.850	2.422.848.016.577	2.508.860.486.917
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.170.509.858.299	1.584.047.641.840	1.374.474.344.850	1.533.745.201.277	1.533.529.979.495
2.1.1	Belanja Pegawai	960.834.873.445	1.199.170.164.000	950.000.000.000	1.011.750.000.000	1.011.750.000.000
2.1.2	Belanja Hibah	24.905.532.760	34.366.747.000	36.980.670.000	106.980.670.000	107.980.670.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	6.925.284.000	7.800.000.000	11.967.898.000	11.967.898.000	11.967.898.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.908.297.976	6.051.000.000	7.133.346.104	7.667.896.104	7.405.793.788
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	97.036.840.802	332.554.567.984	391.167.270.570	391.167.270.570	391.167.270.570
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.899.012.316	4.105.162.856	4.600.573.483	4.211.466.603	5.421.058.630
2.2	Belanja Langsung	754.200.720.793	865.541.504.895	863.461.000.000	889.102.815.300	973.167.795.929
2.2.1	Belanja Pegawai	18.738.477.500	31.804.009.500	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.841.779.740	457.913.024.865	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	398.620.463.553	375.824.470.530	-	-	-

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila selama ini Pemerintah Kabupaten Lebak terlalu mengandalkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA, maka ke depan akan diupayakan untuk mengoptimalkan penggalan sumber penerimaan dari pos lain seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, akan mencakup: penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran dan penyertaan PDAM dalam rangka meningkatkan cakupan air bersih;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilakukan manakala terjadi surplus anggaran;

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2015 – 2018 tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah(Rp)				
		RealisasiTahun 2015	RealisasiTahun 2016	Target Tahun 2017	ProyeksiTahun 2018 (RPJMD)	Proyeksi Tahun 2018 (RKPD)
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	122.788.744.530,15	262,990,961,286	74.037.540.520	121.221.934.130	121.221.934.130
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	55.000.000.000	55.000.000.000
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	122.788.744.530,15	262,990,961,286	74.037.540.520	66.221.934.130	66.221.934.130
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.734.627.391	54,207,502,000	43.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		15,000,000,000	40.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.734.627.391	39,207,502,000	3.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	118.054.117.139,15	208,783,459,286	30.537.540.520	116.221.934.130	116.221.934.130



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran pembangunan

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (P), maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak tahun 2018, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Pembangunan tahun 2018, diarahkan pada percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen jangka menengah daerah. Untuk menjamin pencapaian pembangunan daerah tersebut perlu dilakukan penguatan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan untuk menjamin keberhasilan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan strategis sesuai dengan target sasaran kinerja RPJMD. Selain itu pembangunan yang dilakukan juga melalui pendekatan pembangunan yang bersifat holistic, tematik, integral dan spasial.

Dalam menyusun perencanaan diperlukan tujuan yang terarah. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lebak mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, yaitu

***“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui
Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan”***



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1** : ***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif***, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh;
- Misi 2** : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik***, kondisi birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan dengan karakteristik organisasi yang respon terhadap tuntutan publik terhadap kinerja pelayanan, dengan tetap memegang teguh asas transparansi dan akuntabel;
- Misi 3** : ***Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan***, kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sector pertanian serta pengembangan investasi baik yang dilakukan Pemerintah maupun Swasta;
- Misi 4** : ***Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur strategis Wilayah yang berkualitas***, hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan

memperluas akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dilakukan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas;

Misi 5 : *Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan*, Kabupaten Lebak tetap memosisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan;

Misi 6 : *Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah*, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada keenam misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI ""Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemanfaatan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan""		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia 4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga 5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi 9. Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah 10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan 11. Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan daerah
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan 13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat 14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana dasar

VISI ""Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pematapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan""		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	masyarakat 15. Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman 16. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan & pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan 8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	17. Meningkatnya rehabilitasi lahan 18. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air 19. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas 20. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah 21. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 22. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	23. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 24. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Indikator target kinerja pada tahun 2017 untuk setiap Misi sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran untuk Setiap Misi Tahun 2018

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata.	APK PAUD (%)	29,90
		APK SLTP (%)	99,00
		APK SLTA (%)	-
		APM SD/MI (%)	98,98
		APM SLTP (%)	86,00
		APM SLTA (%)	-
		APS SLTP (%)	99,93
		APS SLTA (%)	94,50
		Angka Putus Sekolah SD (%)	0,22
		Angka Putus Sekolah SLTP (%)	0,10
		Angka Putus Sekolah SLTA (%)	-
		Angka Kelulusan SD (%)	98,13
		Angka Kelulusan SLTP (%)	94,78
		Angka Kelulusan SLTA (%)	-
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP (%)	94,77
		Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA (%)	86,79
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,96
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Persen)	88,95
		Angka Melek Huruf (%)	98,48
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 KH)
	Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000 KH)		20
	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)		63,48

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,55
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82,00
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	72,00
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
		Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular (%)	70
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	78
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	88,95
		Cakupan pelayanan anak balita (%)	90
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita (%)	60
		Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi (%)	0,40
		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	98
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan	100



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS / BTLS / ACLS/PPGD (%)	
		Kepuasan pelayanan RSUD (%)	85
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	9,49
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	67
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,89
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/kel. (%)	88,44
		Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) (Kelompok) - Bina Keluarga Remaja (BKR) (Kelompok) - Bina Keluarga Lansia (BKL) (Kelompok)	379 209 259
	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,86



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	32
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	256
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Orang)	300
		Jumlah Transmigrasi Umum (Orang)	40
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	51
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	41,08
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	42
		Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejah-teraan sosial (Kelompok)	15
		Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera (Orang)	3.559

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
	4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	65,96	
		Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan (Pemuda)	173	
		Jumlah penyelenggaraan event olahraga (Event/Tahun)	2	
	5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan atlet berprestasi (Atlet)	125	
		Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya (%)	100	
	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	Jumlah event budaya (Event/Tahun)	10	
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Pengunjung)	19.000	
		Jumlah perpustakaan milik daerah (Unit)	-	
	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1
			Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (Dokumen)	2
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)			92	
Opini audit BPK			WTP	
Peningkatan Level APIP			3	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)			3	
Tertatanya aset daerah (%)			50	
Sistem Informasi Manajemen Pemda (Aplikasi)			1	
Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media			12	

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Informasi	
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan (Orang)	754
		Jumlah aparatur yang terbina (Org)	10.880
		Rasio Kemandirian Daerah	12,48
		Jumlah prasarana aparatur pemerintahan terbangun dan tertata (Unit)	4
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Unit)	-
		Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan (Orang)	531
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	93
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	91
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	51
		Ketersediaan database kependudukan (%)	98
		Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Lokasi)	5
		Terselesaikannya Masalah Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lebak (kasus)	4
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (Trilyun)	13,57
		Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :	
		- PMDN (Perusahaan)	3
		- PMA (Perusahaan)	1

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Presentase antara realisasi investasi & peminat investasi (%)	80
		Jumlah koperasi aktif (Unit)	750
		Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah	50.132 885 19
		Tertatanya pasar tradisional dan meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	2
		Jenis dan jumlah industri menengah: - Jenis industri - Jumlah industry	24 38
		Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	26 16.744
	9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok :	595.485
		- Padi (Ton)	
		- Palawija (Ton)	35.225
		- Hortikultura (Ton)	184.059
		Daerah rawan pangan (Kecamatan)	-
		Indeks Ketahanan Pangan	0,5
		Sentra kawasan unggulan (Lokasi)	4
		Produksi Daging (Kg)	9.316.869
		Produksi ikan budidaya (Ton)	3.588



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Produksi ikan tangkap (Ton)	6.012,93
		Konsumsi ikan (Kg per Kapita)	18,04
		Cakupan Bina Kelompok Tani:	
		- Pemula - Lanjut - Madya - Utama	1.300 996 116 5
	10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Tahunan) (Kg)	-
		Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % tahunan) (Ton)	32.542,95
	11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.	Jumlah dan jenis obyek wisata (Lokasi/ODTW)	21
Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan)		700.000	
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (%)	66,47
	13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%)	71
		Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) (Unit)	1
(Ha)			
	Terbangun dan terpeliharanya bangunan	1	



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		pengendali banjir	
	14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;	Terbangunnya jalan perdesaan (Km)	120
		Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan (Unit)	2
		Persentase cakupan air bersih (%)	83,02
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	62,50
	15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman	Tertatanya rumah sehat dan layak huni (Unit)	150
		Pembangunan Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan. a. Jalan Lingkungan (meter) b. Drainase Lingkungan (meter) c. Air Bersih dan Sanitasi/MCK (Unit)	1.000 500 5
	16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat	Cakupan elektrifikasi (%)	-
		Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan (Kampung)	-
		Pemasangan PJU (Titik)	-
		Pemeliharaan PJU (Titik)	-
	17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah jenis rambu terpasang : - Rambu-rambu (Unit) - Lampu lalu lintas (Unit) - Marka (M ²)	80 4 700
	18. Meningkatnya sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	-



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	prasarana perhubungan	perhubungan terbangun dan terpelihara (Unit)	
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Hektar)	-
		Rehabilitasi lahan kritis (Hektar)	200
	20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi :	
		- Mata air (Unit)	-
		- Bendungan (Unit)	-
	21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;	Tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah (%)	100
		Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	41
	22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	Persentase penanganan sampah (%)	35
23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	40	
24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	88	
	Cakupan penanggulangan korban bencana (%)	100	
	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (Kali)	10	
6. Meningkatkan keamanan	25. Meningkatnya ketertiban	Tingkat penegakan perda (%)	90



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
dan ketertiban wilayah	umum dan ketentraman masyarakat;	Jumlah Kegiatan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat (%)	12
		Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	84
	26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) (Kegiatan)	2
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Kegiatan)	4
		Terpeliharanya sarana dan prasarana MDTA yang disediakan (Ruang Kelas)	25
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas)	150



4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

4.2.1 Tema RKP Tahun 2018

Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018 yaitu :

“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Tema tersebut dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2015-2019:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

4.2.2 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 yaitu :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
3. Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal
4. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
5. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
6. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha
7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Ketujuh Prioritas Pembangunan Daerah tersebut untuk menjawab isu-isu strategis:

1. Kesenjangan Wilayah
2. Daya Saing Daerah
3. Kemiskinan dan Pengangguran
4. Tata Kelola Pemerintah.

4.2.3 Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018

Prioritas pembangunan tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pembangunan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2014-2019. Berdasarkan landasan tersebut maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2018 yaitu



“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Lebih Maju dan Berdayasaing”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah
2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan berbasis potensi local
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
5. Pengendalian Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, berikut table sinkronisasi Prioritas Pembangunan.

Tabel 4.3 Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2018

RKP	RKPD PROVINSI	RKPD KABUPATEN
Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Kesehatan		
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku	Pembangunan Infrastruktur Daerah
Ketahanan Energi		
Pembangunan Wilayah		Pengendalian Lingkungan Hidup
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman		
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Ekonomi Lokal	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan berbasis potensi lokal
Ketahanan Pangan		
Penanggulangan Kemiskinan	Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	
	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	
	Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha	
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tersebut di implementasikan melalui Program Pembangunan sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Program Pembangunan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
1.	Urusan Pendidikan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan ○ Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan di provinsi, kabupaten/kota; ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (<i>back to school</i>) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang; ○ Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten/kota, meliputi pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk Provinsi, meliputi pendidikan menengah dan kekhususan; ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan; ○ Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Non Formal 4 Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.	Urusan Kesehatan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita ○ pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut ○ pelayanan kesehatan penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat dan orang terduga tuberculosi ○ Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immundeficiency Virus</i>). ○ Peningkatan kesehatan ibu dan anak ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular seperti Malaria, Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, dan Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 + ○ Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) ○ Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) ○ Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (<i>passing out</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Program peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 9 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 14 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 15 Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ○ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. ○ Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah ○ Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya



No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional kedalam Rencana Tata Ruang Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7 Program Pengendalian Banjir 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 9 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 10 Program Perencanaan Tata Ruang 11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota ○ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota ○ Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) dan Pelaksanaan Studi Primer, terutama <i>Environmental Health Risk Assessment (EHRA)</i> ○ Hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi. ○ Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan Perumahan 2 Program Infrastruktur Permukiman Kumuh 3 Program Lingkungan Sehat Perumahan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ○ Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ○ Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah ○ Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi ○ Menyusun rencana penyediaan hunian layak ○ Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh ○ Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh. 	
5.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; ○ pelayanan informasi rawan bencana; ○ pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; ○ pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan ○ pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. ○ Penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; ○ Pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; ○ Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan ○ Penegakan Peraturan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 6 Program Pendidikan Politik Masyarakat 7 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan 8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
		9 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
6.	Bidang Sosial	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; ○ Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; ○ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; ○ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ○ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. ○ Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain: ○ Percepatan penanggulangan kemiskinan; ○ Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti; ○ Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti; ○ Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); ○ Program Keluarga Harapan (PKH); ○ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); ○ Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB); ○ Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); ○ Asistensi Sosial Anak Terlantar; ○ Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); ○ Cakupan rumah tangga miskin dengan 	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang 2 Cacat dan Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit) 3 sosial lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan 4 Kesejahteraan Sosial 5 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>program-program sosial yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan ○ Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 	
	<p>Tenaga Kerja</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi; ○ Pengembangan instruktur yang kompeten; ○ Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi; ○ Pengelolaan informasi pasar kerja; ○ Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; ○ Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; ○ Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; ○ Akreditasi lembaga pelatihan; ○ Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK); 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan kerja 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; ○ Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja; ○ Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi; ○ Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; ○ Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; ○ Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia); ○ Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi; ○ Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; ○ Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial; ○ Penyelesaian perselisihan hubungan 	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial; ○ Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator hubungan industrial; ○ Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK); ○ Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan; ○ Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan; ○ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan ○ Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota. 	
7.	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); ○ Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; ○ Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; ○ Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; ○ Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan ○ Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 	<p>3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p>
8	Pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan Mandiri Pangan (KMP); ○ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); ○ Lumbung Pangan; ○ Toko Tani Indonesia (TTI); dan ○ Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura). 	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian
9	Pertanahan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam rangka meningkatkan kualitas 	1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan



No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>pertanahan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.</p>	<p>Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <p>2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertahanan</p>
10	Lingkungan Hidup	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah; ○ Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (<i>National Determined Contribution</i>) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ○ Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup. 	
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota; ○ Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal; ○ Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga; ○ Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan ○ Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 	Program Penataan Administrasi Kependudukan
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di 	1 Program Peningkatan Pemberdayaan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa; ○ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa; ○ Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat; ○ Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; ○ Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; ○ Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa; ○ Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa; ○ Pengawasan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis; dan ○ Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa. 	<p>Masyarakat Perdesaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (<i>Additional Users</i>) melalui: ○ Peningkatan jumlah Peserta KB baru; ○ Peningkatan jumlah <i>Contraceptive Prevalency Rate (CPR)</i>; ○ Penurunan tingkat putus pakai (<i>Discontinue Rate</i>) ○ Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); ○ Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>); ○ Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan ○ Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun). 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Pelayanan Kontrasepsi 3 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 4 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui: ○ Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); ○ Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR); ○ Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL); ○ Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; ○ Peningkatan usia kawin pertama; ○ Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan ○ Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). ○ Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui: ○ Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan; ○ Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah; ○ Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal; ○ Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi); ○ Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan; dan ○ Penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini. ○ Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan 	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi); ○ Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); ○ Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader); ○ Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan ○ Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB). ○ Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); ○ Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan ○ Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana 	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017 (BOKB).	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
14.	Perhubungan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan; dan ○ Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3 Program peningkatan pelayanan angkutan 4 Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas 5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
15.	Komunikasi dan Informatika	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan informasi publik pemerintah daerah; ○ Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah; ○ Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah; ○ Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; ○ Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan ○ Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-e <i>government</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; ○ Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM; ○ Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM; ○ Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan ○ Pengawasan koperasi. 	Koperasi
17.	Penanaman Modal	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan <i>tracking system</i> (implementasi SPIPISE); ○ Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal; ○ <i>Standard Operating Prosedure</i> (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal; ○ <i>Standard Operating Prosedure</i> (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal; ○ Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan ○ Fasilitasi penyelesaian masalah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
18.	Kepemudaan dan Olah Raga	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota ○ Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum; ○ Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia; ○ Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme; ○ Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan ○ Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja. ○ Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota ○ Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia; ○ Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah; ○ Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. 	
19.	Statistik	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral; ○ Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat; ○ Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral; ○ Melakukan analisa data statistik sektoral; ○ Melakukan penyajian data statistik sektoral; ○ Melakukan diseminasi data statistik sektoral; ○ Penyediaan peralatan infrastruktur; ○ Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan ○ Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral. 	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
20.	Persandian	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi; ○ Pengelolaan informasi berklasifikasi; ○ Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; ○ Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; ○ Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi; ○ Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan ○ Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya 	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>persandian dan operasional pengamanan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: ○ Peralatan Persandian (Palsan) <i>jammer</i> (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan ○ Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat. 	
21.	Kebudayaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; ○ Revitalisasi museum; dan ○ Revitalisasi taman budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
22.	Perpustakaan	
	- Kebijakan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; ○ Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenaga pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; ○ Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; dan ○ Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK. 	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
23.	Kearsipan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan ○ Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 3 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam <i>website</i> masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.</p>	
24.	Kelautan dan Perikanan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); ○ Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ○ Perizinan usaha perikanan tangkap; ○ Pendataan kapal perikanan; ○ Kerjasama Daerah untuk nelayan andon; ○ Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan Perizinan unit pengolahan ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program pengembangan budidaya perikanan 2 Program pengembangan sistem perikanan tangkap 3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 5 Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan 6 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumber daya kelautan 7 Program Pembangunan Sistem Penyuluh Perikanan
25.	Pariwisata	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; ○ Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; ○ Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnyapembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. ○ Pengembangan Ekonomi Kreatif: ○ Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan ○ Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif. 	
26.	Pertanian	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. ○ pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan 5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
27.	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3 Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah
28.	Perdagangan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perijinan dan pendaftaran perusahaan; ○ Sarana distribusi perdagangan; ○ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	dan barang penting; <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan ekspor; dan ○ Standarisasi dan perlindungan konsumen. 	2 Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
29.	Perindustrian	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perencanaan pembangunan industri; ○ Perizinan; ○ Sistem informasi industri nasional; ○ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri); ○ Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan); ○ Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan ○ Pengembangan teknologi. 	1 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
30.	Transmigrasi	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi; ○ Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan; ○ Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi; ○ Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan transmigrasi; ○ Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran transmigran; ○ Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan ○ Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk 	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan transmigrasi; ○ Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi; ○ Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat di permukiman transmigrasi; ○ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; ○ Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan ○ Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria. 	
31.	<p>Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan ○ Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
32.	<p>Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan Data/Informasi

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; ○ Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran; ○ Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini; ○ Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 6 Program Kerjasama Pembangunan 7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 	
33.	Keuangan Daerah	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah; ○ Penerapan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i> dan sistem aplikasi reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan <i>training of trainer</i> pada masing-masing Pemerintah Daerah; ○ Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; ○ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota; dan ○ Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i> dan <i>e-reporting</i> pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah 	<p>1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
34.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; ○ Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang 	<p>1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p>

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	urusan pemerintahan; <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah; ○ Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan ○ Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 	
35.	Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah; ○ Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan; ○ Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan ○ Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional. 	
36.	Pengelolaan Kawasan Perkotaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu; ○ Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan metropolitan maupun kawasan pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>jaringan lintas perkotaan (<i>sister city</i>) pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan; ○ Melaksanakan <i>updating</i> basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung sistem informasi perkotaan; dan ○ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan kabupaten/kota. 	
37.	Penanganan Bencana	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; ○ Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; ○ Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran; ○ Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ○ Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan ○ Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 2 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	kebakaran.	
38.	Pemerintahan Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan; ○ Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan; ○ Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; ○ Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 Program Pemerintahan Umum Daerah 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
39.	Otonomi Daerah dan Desentralisasi	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik; ○ Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota; ○ Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

No	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2017	Program Pembangunan Daerah tahun 2018
	<p>sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, terutama mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.

Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 150 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 terdiri dari 20 program, prioritas 2 mencakup 40 program, prioritas 3 mencakup 31 program, prioritas 4 mencakup 50 program, dan prioritas 5 terdiri dari 9 program. Program-program pembangunan tahun 2018 tersebut akan dijalankan oleh 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Daftar program pembangunan dan pagu indikatif sesuai dengan OPD penanggungjawabnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.1
Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2018

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Infrastruktur Daerah		265.213.022.179	
		1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	14.405.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			309.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.820.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	66.280.623.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4 Program Pengembangan Perumahan	2.923.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	16.685.558.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	121.590.416.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.248.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	50.000.000	Dinas Perhubungan
		9 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	2.945.000.000	Dinas Perhubungan
		10 Program peningkatan pelayanan angkutan	685.000.000	Dinas Perhubungan
		11 Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	2.503.135.000	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		12 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.287.350.000	Dinas Perhubungan
		13 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	120.000.000	Dinas Sosial
		14 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	18.945.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16 Program Pengendalian Banjir	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18 Program Infrastruktur Permukiman Kumuh	2.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		19 Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.614.339.679	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		20 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	50.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan		420.812.207.950	
		1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.211.130.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	76.898.921.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3 Program Pendidikan Non Formal	1.520.995.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				Sekretariat Daerah
4		Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.965.796.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	882.205.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7		Program Pengembangan Nilai Budaya	613.095.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.457.095.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	670.295.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.269.000.000	Dinas Kesehatan
11		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	97.153.936.000	Dinas Kesehatan
12		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.150.000.000	Dinas Kesehatan
13		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	950.000.000	Dinas Kesehatan
14		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	550.000.000	Dinas Kesehatan
15		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.277.225.000	Dinas Kesehatan
16		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.070.000.000	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		17 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	19.504.824.000	Dinas Kesehatan
		18 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	13.906.122.000	Dinas Kesehatan
		19 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	241.160.000	Sekretariat Daerah
		20 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	213.358.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		22 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	200.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	400.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24 Program Keluarga Berencana	5.822.650.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25 Program Pelayanan Kontrasepsi	641.880.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		26 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		27 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		28 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		29 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.475.000.000	Dinas Sosial
		30 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000	Dinas Sosial
		31 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100.000.000	Dinas Sosial
		32 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	300.000.000	Dinas Sosial
		33 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.471.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		34 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	325.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2.086.520.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		36 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	8.875.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		37 Program peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia	100.000.000	Dinas Kesehatan
		38 Program Pengawasan Obat dan Makanan	60.000.000	
		39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit	15.000.000.000	
		40 Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD	142.500.000.000	RSUD Dr. Adjidarmo
3	Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal		56.344.721.850	
		1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	12.086.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dinas pertanian dan Perkebunan Sekretariat Daerah
		2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	542.240.000	Dinas pertanian dan Perkebunan
		3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.500.000.000	Dinas pertanian dan Perkebunan
		4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.590.000.000	Dinas pertanian dan Perkebunan Dinas Peternakan
		5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4.373.183.100	Dinas pertanian dan Perkebunan
		6 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	2.527.244.750	Dinas pertanian dan Perkebunan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		7 Program pengembangan budidaya perikanan	1.435.114.800	Dinas Perikanan
		8 Program pengembangan sistem perikanan tangkap	1.173.340.000	Dinas Perikanan
		9 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	163.950.000	Dinas Perikanan
		10 Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	1.300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		11 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	450.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		12 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.920.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		13 Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9.120.573.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		14 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	283.464.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		15 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	259.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		16 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	589.840.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	648.068.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		18 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	832.615.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
				Sekretariat Daerah



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		19 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.631.053.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah
		20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.130.437.000	Dinas Peternakan
		21 Program peningkatan produksi hasil peternakan	3.310.634.000	Dinas Peternakan
		22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	165.000.000	Dinas Peternakan
		23 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	355.000.000	Dinas Sosial
		24 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.052.604.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	179.860.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		26 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	660.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		27 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	155.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		28 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.750.000.000	Dinas Pariwisata
		29 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	260.000.000	Dinas Peternakan
		30 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.750.000.000	Dinas Pariwisata



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		31 Program Pengembangan Kemitraan	150.000.000	Dinas Pariwisata
4	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah		218,420,842,950	
		1 Program Pengembangan Data/Informasi	1.785.870.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Dinas Sosial
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.502.449.250	Seluruh Perangkat Daerah
		3 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	803.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Dinas pertanian dan Perkebunan
		4 Program Kerjasama Pembangunan	1.120.000.000	Sekretariat Daerah
		5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8.576.350.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		6 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertahanan	130.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.033.414.000	Sekretariat Daerah Kantor Kesbangpol Linmas
		8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	775.402.000	Sekretariat Daerah
		9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.070.855.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah
		10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	242.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.388.725.000	Inspektorat Sekretariat Daerah
		11 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.732.600.000	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
		12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.711.673.000	Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
		13 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1.355.000.000	Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		14 Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	2.914.780.000	Sekretariat Daerah
		15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.052.180.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah
		16 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.133.868.100	Sekretariat DPRD
		17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.661.213.000	Inspektorat
		18 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	310.990.000	Inspektorat
		19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.732.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Kantor Kesbangpol Linmas
		20 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	335.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		21 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	1.733.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		22 program pengamanan kermanan lingkungan	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		23 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	285.000.000	Kantor Kesbangpol Linmas
				Satuan Polisi Pamong Praja
		24 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	366.974.000	Kantor Kesbangpol Linmas
				Satuan Polisi Pamong Praja



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		25 Program Pendidikan Politik Masyarakat	827.310.000	Kantor Kesbangpol Linmas
		26 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		27 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	250.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		28 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	421.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		29 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		30 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	860.000.000	Sekretariat Daerah
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	545.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		32 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.060.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		33 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,158,681,950	Seluruh Perangkat Daerah
		36 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	24.217.424.700	Seluruh Perangkat Daerah
		37 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.086.824.500	Seluruh Perangkat Daerah



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		38 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	7.614.877.750	Seluruh Kecamatan
		39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.199.525.100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dinas Lingkungan Hidup
				Dinas Komunikasi dan Informatika
				Sekretariat Daerah
				Sekretariat DPRD
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		40 Program peningkatan disiplin aparatur	1.057.755.000	Seluruh Perangkat Daerah
		41 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	131.750.000	Inspektorat
		42 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana keraspian	149.940.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Sekretariat Daerah
		43 Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.868.410.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		44 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		45 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN		
		46	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.093.725.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		47	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		48	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		49	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1.370.955.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Dinas pertanian dan Perkebunan
						Dinas Perikanan
			Dinas Peternakan			
50	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	984.820.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	Pengendalian Lingkungan Hidup		12.377.001.000			
		1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.012.420.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.745.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.715.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	590.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.102.555.000	Dinas Lingkungan Hidup
		7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		8 Program Perencanaan Tata Ruang	652.026.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH			973.167.795.929	



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD – P) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, dengan tetap mensinergiskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.

RKPD Tahun 2018 yang akan ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018, untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA